

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA
(COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES)
DAN PEMBERONTAKANNYA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN MARCOS (1965-1986)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah*



Oleh :

Aris Suryanto

NIM : 91214014

NIRM : 910052010604120013



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1996**

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA
(COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES)
DAN PEMBERONTAKANNYA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN MARCOS (1965-1986)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah*

Oleh :

Aris Suryanto

NIM : 91214014

NIRM : 910052010604120013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DIHARMA
YOGYAKARTA
1996**

SKRIPSI

PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA (COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES) DAN PEMBERONTAKANNYA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MARCOS (1965-1986)

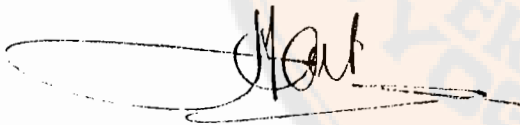
Oleh :

Aris Suryanto

NIM : 91214014
NIRM : 910052010604120013

Telah Disetujui Oleh :

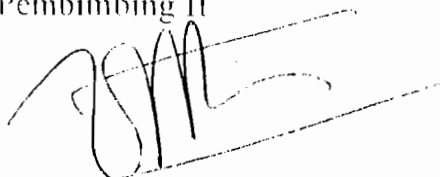
Pembimbing I



Drs. AK. Wiharyanto

22 Juni 1996

Pembimbing II



Drs. JB. Dwijono Atmoko, S.J., M.A.

28 Juni 1996

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA
(COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES)
DAN PEMBERONTAKANNYA PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN MARCOS (1965-1986)**

Oleh :

Aris Suryanto

NIM : 91214014

NIRM : 910052010604120013

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 5 Juli 1996 dan dinyatakan memenuhi syarat
yang diperlukan untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Sejarah

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

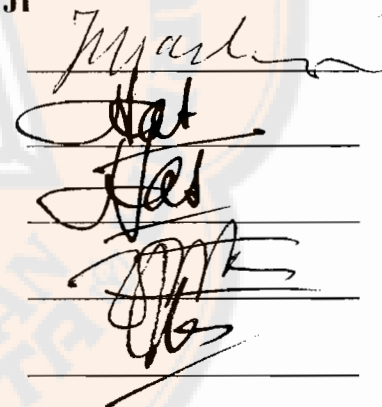
Ketua : Drs. J. Markiswo

Sekretaris : Drs. A.K. Wiharyanto

Anggota : 1. Drs. A.K. Wiharyanto

2. Drs. J.B. Dwijo Atmoko, S.J., M.A

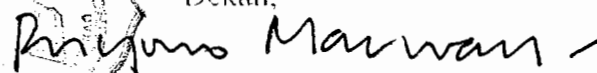
3. Drs. J.B.M. Mudjiharjo



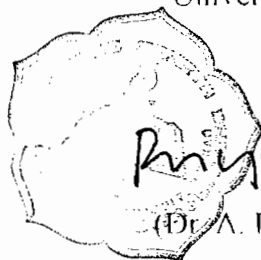
Yogyakarta, 9-9-1996

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,



(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)



Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menyayangi dan membimbingku. Kakak-kakakku terkasih yang selalu memperhatikanku : Mbak Puji, Mbak Yanti, Mbak Unik, Mas Nono dan Mas Ikam.
2. Keponakanku tersayang : Bayu, Nurin, Pipit dan Mimok.
3. Teman-temanku yang setia : Karno, Tarjo, Maman, Andika, Sentot dan Gembur.
4. Seluruh teman-teman Jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 1991.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya maka skripsi yang berjudul *Perkembangan Partai Komunis Filipina (Communist Party of Philippines) dan Pemberontakannya Pada Masa Pemerintahan Presiden Marcos (1965-1986)* dapat diselesaikan. Uraian skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka berperspektif sejarah politik, yang diawali sejak bulan Desember tahun 1995. Penelitian pustaka ini dilakukan dalam rangka mempelajari pemberontakan Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*) pada masa pemerintahan Presiden Marcos di Filipina. Selanjutnya penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini nantinya bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, sejarawan, guru, dosen dan peminat sejarah yang lain dalam mempelajari sejarah Filipina, khususnya masalah pemberontakan komunis di Filipina.

Kegiatan penulisan skripsi ini sekalipun secara formal dilaksanakan oleh penulis sendiri, tetapi di dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan bantuan pemikiran, biaya dan fasilitas dari berbagai pihak yang sangat besar manfaatnya. Atas dasar itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. J. Markiswo, selaku Ketua Jurusan PIPS Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Drs. A.K. Wiharyanto, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah dan sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah berkenan memberikan bimbingan, referensi dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Dwijo Atmoko, S.J., M.A, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, koreksi dan masukan hingga selesainya skripsi ini.
4. Drs. Pascalis S. Meo, staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Karya Desa, Yogyakarta, yang telah membantu penulis mengumpulkan data, menerjemahkan buku-buku literatur berbahasa Inggris dan memberikan masukan-masukan penting dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Soekarsi, selaku orang tua penulis yang telah membiayai penulisan skripsi ini sampai selesai.
7. Siapa saja yang tidak disebutkan namanya disini, yang telah memberikan dukungan dan perhatian dalam bentuk apapun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara penulisannya. Untuk itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan berbagai pemikiran maupun saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, Juni 1996

Penulis,

ARIS SURYANTO



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	15
BAB II. LATAR BELAKANG BERDIRINYA PARTAI KOMUNIS FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MARCOS	19
A. Sistem Kepemilikan Tanah di Filipina dan Dampaknya Bagi Penyebaran Faham Komunis.	19
B. Awal Masuknya Ideologi Komunis ke Fili- pina dan Peranan PKP (<i>Partido Komunista</i> <i>ng Philipinas</i>)	24

C. Peranan Penting Jose Maria Sison dalam Proses Berdirinya Partai Komunis Filipina	39
D. Faktor-faktor yang Mendorong Berdirinya Partai Komunis Filipina (<i>Communist Party of Philippines</i>)	54
 BAB III. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA (CPP)	69
A. Struktur Organisasi dan Sumber Dana Partai Komunis Filipina (<i>Communist Party of Philippines</i>)	69
B. NDF (<i>National Democratic Front</i>) dan NPA (<i>New people Army</i>)	79
C. Keanggotaan Partai Komunis Filipina (<i>Com- munist Party of Philippines</i>)	86
 BAB IV. STRATEGI-STRATEGI PERJUANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA (CPP) DALAM MENGHADAPI KEKUATAN PEMERINTAH FILIPINA	91
A. Garis Besar Strategi Perjuangan CPP dalam Bidang Politik dan Militer	91
B. Peran New People Army (NPA) dalam Pelaksanaan Strategi Militer CPP	96
C. Peran National Democratic Front (NDF) dalam Pelaksanaan Strategi Politik CPP	104

BAB V. USAHA-USAHA YANG DITEMPUH PEMERINTAHAN	
PRESIDEN MARCOS UNTUK MENUMPAS PEMBERONTA-	
KAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA (CPP)	109
A. Kondisi Angkatan Bersenjata Filipina Pada	
Masa Pemerintahan Presiden Marcos dan	
Dampaknya Bagi Usaha Pemadaman Pemberon-	
takan Partai Komunis Filipina (CPP)	109
B. Operasi Anti Pemberontakan (<i>Counter Insur-</i>	
<i>gency Operation</i>)	116
C. Operasi Stabilitas (<i>Oplan Katatagan</i>) ...	120
BAB VI. PENUTUP	127
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	135

ABSTRACT

**The Growth of Communist Party of the Philippines
and Its Rebellion During Marcos' Administration
(1965 - 1986)**

Aris Suryanto
Sanata Dharma University
Yogyakarta
1996

The research aims to find out the existence of the armed rebellion and activity of Communist Party of the Philippines. The discussed case in this thesis has generally the dimension of political history.

This thesis was a library research. Through critical analysis, the historical data then were processed to get the final conclusions.

The result describes the growth, rebellion activity, especially it's existence background, organizational structure, and rebellion strategies of Communist Party of the Philippines.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberontakan komunis bukanlah hal yang baru bagi Filipina. Sejak jaman imperialisme Amerika Serikat sampai dewasa ini Filipina selalu dibayangi oleh pemberontakan bersenjata golongan komunis. Walaupun pada masa pemerintahan Presiden Fidel Ramos dewasa ini, kegiatan dan aktifitas pemberontak komunis sudah semakin melemah. Tidak dapat disangkal, pemberontakan komunis di Filipina mendapat simpati dan dukungan cukup luas dari mayoritas masyarakat lapisan bawah karena prinsip-prinsip perjuangan golongan komunis memang cenderung memihak kepentingan dan hak rakyat kecil. Karena mempunyai "basis" yang cukup kuat di kalangan masyarakat lapisan bawah ini, maka pemberontakan komunis di Filipina sulit dipadamkan secara tuntas.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba membahas dan menguraikan seluk beluk pemberontakan komunis di Filipina, terutama pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos, dengan mengambil judul "*Perkembangan Partai Komunis Filipina (Communist Party of Philippines)*" dan Pemberontakannya Pada Masa Pemerintahan Presiden Marcos (1965-1986)". Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut, karena penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai aktifitas pemberontakan Partai Komunis

Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Presiden Marcos. Selain itu kelangkaan buku-buku yang membahas secara khusus mengenai pemberontakan komunis di Filipina, terutama yang berbahasa Indonesia, juga ikut mendorong penulis untuk mengungkapkan permasalahan tersebut dalam skripsi ini. Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah mengenai pemberontakan komunis di Filipina, khususnya pemberontakan Partai Komunis Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Presiden Marcos.

Bertolak dari judul skripsi di atas dan untuk mengungkapkan beberapa pemikiran dalam tulisan ini, berturut-turut akan dikemukakan uraian mengenai timbul dan berkembangnya faham komunisme, serta prinsip-prinsip komunisme menurut Karl Marx dan Mao Zedong.

Timbulnya faham komunis dilatarbelakangi oleh situasi sosial pada awal abad ke-19 di Eropa Barat, ketika kaum buruh hidup dalam keadaan sangat menyedihkan. Sistem kapitalisme yang mendominasi perkembangan sektor industri dan lebih mengutamakan keuntungan ekonomis, telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kehidupan kaum buruh. Mereka ini mendapat upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga kerja anak-anak maupun wanita diperlakukan sewenang-wenang, tinggal di rumah-rumah kumuh dan bekerja dalam pabrik yang tidak terjamin keamanannya.

Karl Marx, seorang filsuf besar Jerman pada abad ke-19 tersentuh oleh kehidupan kaum buruh ini. Beliau kemudian mulai mengembangkan konsepsi-konsepsi baru dan strategi-strategi tertentu yang lebih radikal untuk merombak masyarakat liberal-kapitalis yang dinilainya "sakit". Gagasan-gagasan dan ajaran-ajarannya itulah yang kemudian hari disebut oleh pengikutnya sebagai Marxisme, atau kadang kala disebut sebagai komunisme. 1)

Ajaran komunis yang dikembangkan oleh Karl Marx, semakin menemukan sosoknya yang jelas ketika Rusia menjadi negara komunis pertama di dunia pada tahun 1917. Melalui usaha intensif, Rusia berhasil mengkomunikasikan sebagian besar negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur, antara tahun 1945 sampai 1950-an. Kemudian menjalar ke benua Asia, Amerika dan Afrika. Suatu gejala historis yang betul-betul mengagumkan terlebih bila diingat, bahwa sekali suatu negara menjadi komunis kemungkinan tidak ada harapan untuk berubah kembali menjadi negara liberal demokratis.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, komunisme dimengerti sebagai sistem sosial-politik, ideologi dan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai Marxisme. 2) Adapun Marxisme

1) Sutarjo Adisusilo, Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad VIII-XIX, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994, hal. 114 - 115.

2) Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1982, hal. 87

dipahami sebagai ajaran atau doktrin yang bersumber pada gagasan-gagasan Karl Marx. Ajaran Karl Marx pada dasarnya menitikberatkan pada empat ide, yaitu: ³⁾

- a. Sistem kapitalisme mengakibatkan sekelumit kecil orang kaya hidup dalam kemewahan berlimpah, sedangkan kaum pekerja/buruh yang teramat banyak jumlahnya hidup dalam kesengsaraan.
- b. Cara untuk merombak ketidakadilan adalah dengan melaksanakan suatu sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat-alat produksi dikuasai oleh negara, bukannya pribadi swasta.
- c. Pada hematnya, satu-satunya jalan paling baik untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan.
- d. Untuk mewujudkan suatu sistem sosialis harus dibentuk kediktatoran partai komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Menurut Karl Marx, untuk melakukan revolusi guna membentuk sebuah masyarakat komunis penuh, maka inti kekuatan kaum revolusioner harus didasarkan pada kekuatan kaum proletar. Analisa Karl Marx untuk menempatkan kaum proletar/buruh sebagai inti kekuatan revolusi, didasarkan atas dua alasan, yaitu:

³⁾ Michael Hart, Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985, hal. 88

- a. Jumlah kaum proletar/buruh cukup besar dan mereka yang merasakan langsung penderitaan akibat sistem kapitalisme di Eropa pada waktu itu.
- b. Kaum proletar/buruh banyak bermukim di wilayah perkotaan, sehingga tenaga mereka dapat digunakan secara efektif untuk merebut pusat-pusat kekuasaan pemerintah di kota-kota.

Lebih lanjut, dalam analisisnya Karl Marx juga menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kaum revolusioner untuk mewujudkan masyarakat komunis, setelah kemenangan politis berhasil dicapai. Menurut Karl Marx, setelah kemenangan politis berhasil dicapai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk pemerintahan diktatur proletariat, yang unsurnya terutama berasal dari kaum buruh dan tani. Setelah itu, pemerintahan diktatur proletariat harus segera melancarkan proses nasionalisasi dan sosialisasi alat-alat produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme. Setelah diadakan proses nasionalisasi alat-alat produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme diharapkan secara bertahap akan terbentuklah fase masyarakat komunis penuh, dimana berlaku prinsip ekonomi: setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima balas jasa sesuai dengan kebutuhannya. Gagasan dan prinsip-prinsip ajaran Karl Marx untuk pertama kalinya digunakan Lenin untuk melancarkan revolusi di Rusia guna membentuk sebuah masyarakat baru. Setelah berhasil mendirikan

negara komunis di Rusia dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat revolusi, Lenin mulai mengadakan penyempurnaan terhadap prinsip-prinsip ajaran Karl Marx. Menurut Lenin, ajaran Karl Marx yang semula ditujukan untuk merombak masyarakat kapitalis Eropa Barat perlu disempurnakan lagi agar bisa dijadikan pedoman untuk melancarkan revolusi serupa di negara-negara dimana sektor industrinya belum dominan.

Pada dasarnya Lenin melakukan penyempurnaan terhadap gagasan-gagasan Karl Marx dalam hal peranan partai, petani dan revolusi. Dalam masalah kepartaian Lenin tidak sepaham sepenuhnya dengan Marx. Dalam pemikiran Marx partai itu hendaknya mempunyai massa yang banyak dan terdiri dari kaum buruh yang fanatik terhadap ajaran komunis. Sedangkan menurut Lenin partai itu haruslah kecil, militan dan terdiri dari "profesional revolutionaries" untuk memimpin kaum proletar. Kalau sekarang disebut partai kader. Partai seperti itulah yang mungkin merupakan alat yang ampuh untuk mewujudkan masyarakat komunis. Lenin pun tidak setuju sepenuhnya dengan apa yang dikemukakan Marx tentang revolusi. Menurut Marx revolusi komunis harus menitikberatkan pada kekuatan kaum proletar dan dilakukan di negara dimana sektor industrinya mempunyai kedudukan yang cukup dominan. Namun menurut Lenin, revolusi komunis dapat dilakukan di negara agraris yang sektor industrinya belum berkembang. Revolusi ini dapat dilakukan dengan bantuan kaum petani yang akan

mendukung perjuangan kaum proletar yang jumlahnya belum cukup besar. Tetapi menurut Lenin, kekuatan utama atau inti kekuatan kaum revolusioner tetap harus dipegang oleh kaum proletar. ⁴⁾ Ajaran Karl Marx yang telah diberi tafsiran khusus oleh Lenin inilah yang nantinya dinamakan ajaran Marxisme-Leninisme.

Selain Karl Marx, tokoh komunis yang cukup terkemuka di dunia adalah Mao Zedong. Mao Zedong dikenal sebagai bapak pendiri negara komunis Cina dan tokoh komunis paling besar di Asia. Walaupun dikenal sebagai pengikut ajaran Marxisme, tetapi Mao Zedong tidak menelan mentah-mentah prinsip-prinsip komunisme menurut Karl Marx. Mao Zedong berusaha menafsirkan prinsip-prinsip Marxisme sesuai dengan kondisi obyektif dan situasi konkret negara Cina pada waktu itu. Seperti kita ketahui, bahwa Cina pada awal abad ke-20 merupakan negara yang bercorak agraris dengan sektor industri yang kurang berkembang. Sedangkan ketika Karl Marx mulai menelorkan ide-idenya tentang komunisme pada abad ke-19, negara-negara di Eropa pada umumnya sudah mengalami proses industrialisasi yang cukup pesat.

Dengan demikian menurut Mao Zedong, revolusi di Cina, harus mendasarkan diri pada kekuatan dan dukungan kaum tani. Lebih lanjut Mao Zedong memaparkan, bahwa titik berat revolusi harus difokuskan atau dimulai dari

⁴⁾ Adisusilo, hal. 140

desa-desa, bukan dari kota-kota. 5) Pandangan Mao Zedong untuk menempatkan kaum tani sebagai inti kekuatan revolusi komunis, didasari atas beberapa alasan, yaitu:

- a. Jumlah kaum tani cukup besar, dan mereka yang mengalami langsung penderitaan akibat sistem oligarki tuan tanah dan sistem politik di Cina pada waktu itu.
- b. Hanya kaum tanilah yang sanggup menyediakan bahan makanan dan bahan-bahan mentah lainnya untuk kepentingan revolusi. Selain itu, jumlah petani yang cukup besar dapat digunakan sebagai anggota tentara kaum revolusioner.

Dalam bukunya, *Demokrasi Baru*, yang ditulis pada bulan November 1938, Mao juga menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil kaum revolusioner setelah kemenangan politis berhasil dicapai. Menurut Mao, setelah kemenangan politis berhasil dicapai, maka kaum revolusioner harus segera membentuk pemerintahan koalisi demokrasi yang unsur-unsurnya terdiri dari kaum tani, kaum buruh, kaum borjuis dan kaum kapitalis nasional. 6)

Dalam bidang ekonomi, tindakan yang perlu segera dilaksanakan adalah tetap mengakui hak milik dan melegalkan sistem kapitalisme. Namun sistem kapitalisme yang dibiarkan hidup adalah sistem kapitalisme nasional. Yang

5) Arifin, Bey, Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung, Penerbit Tinta Mas, Jakarta, 1953, hal. 18

6) Armin Pane, Tiongkok Zaman Baru, Penerbit Arbati, Jakarta, hal. 52

dimaksudkan sistem kapitalisme nasional menurut Mao adalah sistem kapitalisme yang lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan umum/nasional, daripada mencari keuntungan ekonomis semata. Dalam sistem kapitalisme ini akan diwujudkan suatu bentuk hubungan baru yang saling menguntungkan antara pihak pengusaha dan buruh. Di satu pihak, pengusaha harus melindungi kepentingan dan hak-hak buruh. Di lain pihak, buruh harus selalu meningkatkan kualitas kerja dan pengabdian terhadap pengusaha di mana ia bekerja. Sedangkan dalam bidang agraria, langkah pertama yang segera dilakukan adalah melakukan usaha land reform (pembagian tanah) untuk kepentingan kaum petani kecil. Menurut hemat Mao Zedong, sistem kapitalisme nasional dan pelaksanaan land reform secara optimal, secara bertahap akan membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat komunis penuh. Jadi revolusi komunis di Cina pada dasarnya merupakan revolusi demokrasi borjuis, bukan revolusi sosialisme proletar.

Apabila ditelaah lebih mendalam prinsip-prinsip Marxisme yang telah "direvisi" oleh Mao Zedong, memang lebih sesuai apabila diterapkan di Cina, maupun negara-negara Asia lainnya. Karena seperti kita ketahui, negara-negara di Asia pada umumnya merupakan negara yang bercorak agraris dengan sistem ekonomi yang bertumpu terutama pada sektor pertanian, sehingga perjuangan kaum komunis di Asia tidak mungkin dilakukan dengan bergantung diri pada kekuatan kaum proletar. Maka tidak

heran, gerakan-gerakan komunis di Asia pada pertengahan abad ke-20 lebih cenderung mempraktekkan prinsip-prinsip ajaran Mao Zedong, daripada prinsip-prinsip ajaran Karl Marx, termasuk gerakan komunis di Filipina pada masa Presiden Marcos.

Semenjak kemerdekaannya, Filipina tidak pernah mengalami suatu masa damai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, Filipina selalu dipenuhi oleh konflik-konflik dalam negeri, pemberontakan dan permasalahan-permasalahan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Sebagai negara sedang berkembang yang baru saja memerdekakan diri, Filipina memang sedang dalam masa transisi untuk menemukan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang sedang dalam proses mendewasakan dirinya, Bangsa Filipina memang terus dan selalu dihadapkan pada berbagai gelombang hambatan dan rintangan. Secara historis, tantangan terutama yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Filipina adalah perlawanan kaum komunis yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara komunis di Filipina. Filipina yang notabene merupakan negara sedang berkembang dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang masih belum stabil, memang akhirnya menjadi lahan yang cukup baik bagi usaha penyebaran ideologi komunis.

Seperti halnya gerakan-gerakan komunis di Asia pada umumnya, dan Asia Tenggara pada khususnya, gerakan komunis di Filipina juga mendasarkan diri terutama pada

dukungan kaum tani dan sumber daya pedesaan. Sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya hidup di sektor pertanian, dengan sendirinya kaum tani menjadi dasar dan kekuatan utama revolusi. Dalam konteks ini, sukses akhir kaum komunis memang bergantung pada kemampuan mereka menyusup ke komunitas pedesaan dan memobilisasikan partisipasi kaum tani secara maksimal. Pergerakan komunis di Filipina memang mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan pergerakan komunis di Rusia tahun 1917. Gerakan komunis di Rusia cenderung untuk mengkonsolidasikan kekuatan revolusi pada basis-basis urban dalam masyarakat, yang terutama terdiri dari kaum buruh dan orang-orang yang hidup dari sektor industri. Kaum buruh ini terkonsentrasi paling banyak di kota-kota besar dan pusat-pusat industri yang telah terpengaruh westernisasi. Kota-kota ini juga menjadi tempat kedudukan utama gerakan komunis di Rusia.

Gerakan komunis yang terdapat di Filipina merupakan suatu sintesa yang unik, yang mencerminkan interaksi yang erat antara kaum komunis dengan kekuatan sosial revolutioner kaum tani. Dalam proses memobilisasi kekuatan kaum tani untuk mendukung revolusi, kaum komunis Filipina selalu berupaya untuk menyusup dan mengorganisasikan masyarakat lokal. Kaum tani secara perlahan-lahan diberikan otonomi organisasi dan solidaritas yang tidak pernah mereka rasakan dalam struktur sosial-politik pertanian tradisional. Begitu kaum tani memperoleh sarana untuk

menjadi kelas tersendiri (di pedesaan), diharapkan mereka akan mampu menghancurkan dominasi para tuan tanah, persis seperti yang dilakukan oleh para petani Cina pada masa revolusi komunis. Melalui bantuan kader-kader komunis lokal, pemberontakan komunis di Filipina secara keseluruhan berlangsung dibawah "payung" administratif dan militer yang diberikan penguasa partai komunis di daerah-daerah basisnya. Sehingga pemberontakan komunis di Filipina tidak berkulminasi seperti pemberontakan komunis di Rusia 1917, yang melakukan penguasaan atas desa-desa pertanian dengan cara anarkis. Bahkan usaha pemberontakan tersebut memperkuat persatuan politik yang ada antara para petani dengan kaum komunis. Serta mendorong para petani untuk melipatgandakan upaya mereka untuk memberi dukungan Tentara Merah, tempat mereka menggantungkan harapannya.

Fenomena yang cukup menarik untuk diamati dalam sejarah pergerakan komunis di Filipina adalah motivasi kaum tani untuk bergabung dengan pihak komunis. Kaum tani yang terlibat dalam pemberontakan komunis sejak masa imperialisme Amerika hingga masa pemerintahan Republik Filipina, pada dasarnya memiliki sedikit sekali pengetahuan dan pemahaman mengenai Marxisme. Yang menjadi pendorong utama keterlibatan kaum tani adalah keluhan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka bukan tujuan

kaum komunis. ⁷⁾ Dengan demikian alasan utama mayoritas kaum tani bergabung dengan pihak komunis pada dasarnya dilandasi motivasi-motivasi bersifat sosial-ekonomis, bukannya motivasi-motivasi bersifat ideologis.

Berdasar kurun waktunya, sejarah gerakan komunis di Filipina dapat dibagi dalam dua periode. Periode pertama berlangsung sebelum tahun 1968. Pada masa ini gerakan komunis di Filipina dipelopori oleh *Partido Komunista ng Philipinas* (PKP), yang merupakan partai komunis pertama di Filipina. Periode kedua berlangsung setelah tahun 1968. Gerakan komunis pada masa ini dipelopori oleh Communist Party of Philippines. Gerakan komunis di Filipina sebelum dan sesudah tahun 1968 pada dasarnya mempunyai corak dan pola perjuangan yang cukup berbeda. Tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah negara komunis di Filipina. Melalui skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan secara panjang lebar mengenai gerakan komunis yang berlangsung setelah tahun 1968, yang dipelopori oleh Communist Party of Philippines (CPP). Untuk bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini, penulis akan membicarakan seluk beluk aktifitas perjuangan CPP untuk meraih tujuannya.

⁷⁾ Raymond Bonner, Keserakahan Sang Diktator, Keluarga Marcos, dan Perwujudan Kebijakan Amerika Serikat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 51

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat uraian mengenai latar belakang masalah di atas, dapatlah penulis merumuskan masalah pokok yang akan menjadi obyek dari penulisan skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos ?
2. Bagaimana struktur organisasi dan keanggotaan Partai Komunis Filipina (CPP) ?
3. Bagaimana strategi-strategi perjuangan Partai Komunis Filipina (CPP) dalam menghadapi kekuatan pemerintahan Filipina ?
4. Usaha-usaha apa yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Ferdinand E. Marcos untuk memadamkan pemberontakan Partai Komunis Filipina (CPP) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Presiden Marcos.
2. Mengetahui struktur organisasi dan keanggotaan Partai Komunis Filipina (CPP).
3. Mengetahui strategi-strategi yang digunakan Partai Komunis Filipina (CPP) dalam pemberontakannya.
4. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintahan Presiden Marcos dalam menumpas pemberontakan Partai Komunis Filipina (CPP).

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya bisa dijadikan sumber informasi ilmiah bagi para mahasiswa, sejarawan, guru, dosen dan peminat sejarah yang lain dalam mempelajari sejarah Filipina, khususnya masalah pemberontakan komunis di Filipina.

E. Metode Penelitian

Skripsi yang sudah tersaji ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (library research). Dari penelitian kepustakaan ini, penulis dapat menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data historis dan menghindari duplikasi penelitian. 8) Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan data historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang memberikan stempel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang. 9) Data historis akan didapatkan dari

8) Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 45

9) Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Pen. Alumni, Bandung, 1980, hal. 225-226

dokumen-dokumen berupa literatur-literatur yang ada di perpustakaan, baik yang berupa buku, majalah atau publikasi lainnya yang tersedia.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, tentunya akan banyak buku-buku yang akan dibaca dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diintrepetasi guna menemukan generalisasinya. Penganalisaan digunakan untuk meramu data-data yang telah didapat guna mencari kesimpulan yang muncul. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan pokok yang telah ditegaskan dalam perumusan masalah. Pertama, apakah latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos. Kedua, bagaimanakah struktur organisasi dan keanggotaan Partai Komunis Filipina (CPP). Ketiga, bagaimanakah strategi perjuangan Partai Komunis Filipina (CPP) dalam menghadapi kekuatan pemerintah Filipina. Keempat, usaha-usaha apa yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Ferdinand E. Marcos untuk memadamkan pemberontakan Partai Komunis Filipina.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilihan subyek untuk diselidiki
2. Menemukan sumber selengkap-lengkapunya
3. Mengritik sumber dengan tujuan menguji otentisitas dengan kritik ekstern maupun intern

4. Menganalisa sumber keterangan
5. Sintesa sumber keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan
6. Membandingkan sumber lain yang otentik
7. Intrepetasi sejarah berdasarkan sumebr-sumber yang diperoleh
8. Penulisan laporan sejarah. ¹⁰⁾

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, maka susunan sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.
- Bab II menguraikan latar belakang berdirinya Partai Komunis Filipina (CPP) pada masa pemerintahan Marcos.
- Bab III menguraikan struktur organisasi dan keanggotaan Partai Komunis Filipina (CPP).
- Bab IV menguraikan strategi-stategi yang digunakan Partai Komunis Filipina (CPP) dalam usaha pemberontakannya.
- Bab V menguraikan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Marcos dalam usahanya

¹⁰⁾ Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1975, hal. 34

memadamkan pemberontakan Partai Komunis Filipina (CPP).

Bab VI Penutup.

Penulisan skripsi ini menyangkut bidang studi sejarah, maka penulis menggunakan metode penulisan diskriptif analitis. Metode penulisan diskriptif analitis mempunyai pengertian sebagai suatu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. ¹¹⁾ Melalui metode diskriptif analitis, peristiwa-peristiwa sejarah berusaha diuraikan berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan, serta memperhatikan dimensi ruang dan waktu. Disamping menggunakan metode diskriptif analitis, penulisan skripsi ini juga menggunakan teknik pendekatan multidimensional. Ini dimaksudkan agar penulisan peristiwa sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks. Ditinjau dari jenis aktivitasnya, penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian interpretasi kritis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran mengenai suatu masalah dalam bentuk uraian kritis dan logis. Kritis dan logis dalam arti sesuai dengan fakta yang ada, jelas dan rasional.

¹¹⁾ Winarno, Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1982, hal. 132.

BAB II

LATAR BELAKANG BERDIRINYA PARTAI KOMUNIS

FILIPINA (CPP) PADA MASA PEMERINTAHAN

PRESIDEN MARCOS

**A. Sistem Kepemilikan Tanah di Filipina dan Dampaknya
Bagi Penyebaran Faham Komunis**

Melihat proses perkembangan ideologi komunis di Filipina, keberadaannya memang sangat dipengaruhi oleh kondisi obyektif dan situasi konkret yang terdapat di Filipina. Seperti di Cina sebelum menjadi negara komunis pada tahun 1949, Filipina juga merupakan negara yang bercorak agraris, dengan dominasi golongan tuan tanah yang cukup kuat di sektor sosial maupun politik. Sebagian besar tanah pertanian di Filipina dikuasai oleh golongan tuan tanah, sehingga sebagian besar petani kecil hanya dapat hidup sebagai penggarap upahan dan mengerjakan sawah atau perkebunan milik para tuan tanah. Ironisnya, kaum tuan tanah sering melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk melipatgandakan keuntungan, yang cenderung merugikan kaum petani kecil. Seringkali mereka juga kurang memperhatikan, bahkan menindas kepentingan dan hak kaum petani kecil yang bekerja di tanahnya. Oleh karena itu tidak mengherankan, golongan tuan tanah di Filipina sering mendapat perlawanan dari para petaninya.

Dilihat dari konteks historis, munculnya sistem oligarki golongan tuan tanah (landlordisme) bermula

ketika pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina mengadakan perubahan penting dalam bentuk pemilikan tanah pada abad ke-17. Semula tanah-tanah milik berbagai suku di Filipina dimiliki secara komunal. Tetapi oleh pemerintah kolonial Spanyol, sistem pemilikan tanah tersebut diperbaharui dengan menetapkan kepala suku sebagai pemilik keseluruhan tanah suku yang berada dibawah perlindungannya. Kondisi semacam ini akhirnya mengakibatkan seluruh anggota suku berkedudukan/berstatus sebagai penyewa tanah para kepala sukunya. ¹²⁾ Dalam perkembangan selanjutnya, karena motivasi yang bersifat ekonomis, para kepala suku sering menjual tanahnya kepada orang-orang kaya di luar sukunya. Terutama kepala kelompok keturunan baru di Filipina yang disebut kaum *mestizo*. Selain itu kepala suku juga sering menjual tanahnya kepada ordo-ordo keagamaan yang terdapat di Filipina.

Asal-usul golongan *mestizo* yang nantinya akan mendominasi kepemilikan sebagian besar tanah di Filipina ini, bermula ketika pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Spanyol di Filipina melakukan kawin campur dengan gadis-gadis Filipina. Dari proses kawin campur ini, maka muncullah keturunan baru di Filipina yang berdarah campuran Spanyol-Filipina. Komunitas inilah yang disebut golongan *mestizo*. Selain keturunan orang

¹²⁾ L. Widyasusanta, Sejarah Filipina, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1991, hal. 6-7.

Filipina dan Spanyol, yang disebut kaum *mestizo* adalah keturunan orang-orang Cina dengan Filipina. Pada awal abad ke-16, ketika pemerintah Spanyol di Filipina mengadakan hubungan perdagangan secara intensif dengan Cina, banyak saudagar Cina kawin dengan gadis-gadis pribumi. Secara ekonomis, sebagian besar kaum *mestizo* mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Ketika pemerintah kolonial Spanyol di Filipina mengadakan perubahan bentuk kepemilikan tanah pada abad ke-17, komunitas *mestizo* ini kemudian berusaha memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada.

Mereka kemudian memusatkan perhatiannya untuk membeli dan menguasai tanah-tanah suku diberbagai wilayah di Filipina. Selain untuk mengusahakan tanaman perkebunan yang berkualifikasi ekspor, mereka juga menyewakan tanah-tanahnya kepada para *inquilinos* (penyewa tanah) dengan tarif tertentu. Para *inquilinos* ini sebagian besar adalah petani perkebunan yang mempunyai sejumlah pembantu. Sesudah tarif sewa tanah dibayarkan pada tuan tanah, para *inquilinos* dapat membagi hasil panen dengan para pembantu mereka. ¹³⁾ Dalam perkembangan selanjutnya, dominasi komunitas *mestizo* ini semakin kuat dalam kehidupan sosial dan sejarah politik Filipina. Dengan demikian hal

¹³⁾ Jose S. Arcilla, An Introduction to Philippine History, Ateneo de Manila University Press, Manila, 1973, hal. 70.

tersebut menjadi faktor yang sangat penting untuk memahami bangsa Filipina pada saat ini.

Karena kondisi ekonomi yang cukup mapan, golongan tuan tanah di Filipina mempunyai status sosial yang cukup tinggi baik pada masa imperialisme Spanyol maupun imperialisme Amerika Serikat hingga saat ini. Pada masa kekuasaan Amerika Serikat di Filipina, banyak tuan tanah yang menduduki posisi-posisi penting kenegaraan. Pada masa ini mereka mempunyai pengaruh yang cukup luas dalam bidang politik dan ekonomi. Hingga saat ini pengaruh golongan tuan tanah masih cukup kuat, karena dari mereka banyak yang menjadi anggota Kongres (badan legislatif) dan menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan Filipina. Tetapi seringkali mereka hanya memperjuangkan kepentingan politik maupun ekonomi golongannya, bukannya kepentingan rakyat secara keseluruhan. Selain buruknya kondisi kehidupan kaum petani kecil, kesenjangan sosial dalam masyarakat Filipina, baik pada masa penjajahan Amerika hingga masa pemerintahan Republik Filipina, semakin diperparah dengan adanya "tradisi" penyalahgunaan jabatan di kalangan birokrat Filipina, program land reform yang selalu gagal dan buruknya kondisi kehidupan kaum buruh di perkotaan. Kesenambungan kekuasaan berarti, bahwa yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin menjadi semakin miskin.

Profesor Wilfredo F. Arce dan Profesor Ricardo G. Abad, dua ahli sosiologi dari Ateneo de Manila

University, secara lebih terperinci menggambarkan keadaan masyarakat Filipina selama empat dasawarsa sejak kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, sebagai berikut. ¹⁴⁾ Dalam masyarakat Filipina telah terjadi dualisme sektor sosial, yaitu antara yang "mapan" dan yang "dirugikan". Di satu pihak terdapat satu sektor yang relatif kecil tetapi berpengaruh dan kuat. Pengendalian sebagian sumber daya Filipina berada dalam tangan sektor ini, yang juga memegang tampuk pimpinan birokrasi, baik dalam pemerintahan maupun swasta. Populasi dalam sektor ini terdiri dari kalangan pimpinan pemerintahan, bisnis, serta kalangan "berpengaruh" lainnya yang terutama berasal dari kalangan tuan tanah. Kebanyakan dari mereka yang termasuk dalam sektor yang dirugikan ini, tinggal di pedesaan dan mencari nafkah sebagai petani kecil dan buruh. Satu karakteristik penting yang menandai segenap penduduk yang dirugikan ini adalah kemiskinan mereka. Mereka miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap atau karena upah/imbalan materiil yang dimiliki hanya memungkinkan kehidupan pada tingkat subsistem belaka.

Gambaran ini, yaitu suatu masyarakat yang terbagi dalam dua sektor yang kelihatan perbedaannya, mengingatkan kita pada konsep "masyarakat dualistik" yang dikemukakan untuk pertama kalinya oleh seorang ahli

¹⁴⁾ John Bresnan (ed.), Krisis Filipina, Zaman Marcos dan Keruntuhannya, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 70-73.

ekonomi Belanda, J.H. Boeke, sehubungan dengan keadaan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Konsep ini oleh para ahli ilmu sosial selanjutnya yang merujuk pada Boeke juga disebut "dualisme sosiologis". Kedua istilah ini dalam garis besarnya memberikan suatu gambaran masyarakat yang terdiri dari dua bagian yang berlainan dan tidak mungkin dapat diselaraskan.

Melihat kondisi dan situasi sosial ekonomi di Filipina, baik pada masa imperialisme Amerika maupun selama empat dasawarsa sejak kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, maka logislah paham komunis mendapat tempat di kalangan masyarakat lapisan bawah Filipina, terutama kaum petani dan buruh. Paham komunisme yang bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat yang lebih egaliter dimana kekayaan dibagikan secara lebih merata dan adil, serta adanya pembatasan atas hak milik pribadi, akhirnya menjadi inspirasi dan landasan perjuangan masyarakat lapisan bawah Filipina untuk mendapatkan hak-hak mereka.

B. Awal Masuknya Ideologi Komunis ke Filipina dan Peranan *Partido Komunista ng Philipinas* (PKP)

Paham komunis mulai masuk dan tersebar luas ke Filipina pada tahun 1920-an. Ditinjau dari situasi global dunia pada waktu itu, masuknya ideologi komunis ke Filipina merupakan dampak diadakannya Kongres Komunis Internasional (Komintern) di Moskwa pada tahun 1919. Dalam kongres ini hadir tokoh-tokoh beraliran komunis, maupun

tokoh-tokoh partai komunis dari seluruh dunia. Kongres ini diadakan guna menentukan program-program partai komunis di seluruh dunia untuk menyebarluaskan ideologi komunis dan melancarkan revolusi proletariat. 15) Untuk menindaklanjuti keputusan kongres tersebut, Pemerintahan Lenin di Moskwa, Uni Soviet, mulai menjalin kontak dan komunikasi intensif dengan gerakan-gerakan komunis di seluruh dunia.

Kontak pertama antara tokoh-tokoh buruh Filipina beraliran komunis dengan Pemerintahan Lenin dimulai pada tahun 1924. Pada tahun tersebut pihak Uni Soviet mengundang tokoh-tokoh buruh Filipina ini untuk menghadiri konferensi buruh internasional di Moskwa. Setelah menghadiri konferensi tersebut, tokoh-tokoh buruh Filipina ini juga mengadakan lawatan atau kunjungan keliling ke seluruh Moskwa dan negara-negara bagian Uni Soviet. Melalui kunjungan ini, tokoh-tokoh buruh Filipina tersebut semakin tertarik dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Uni Soviet, dan yang lebih fundamental mereka semakin meyakini prinsip-prinsip ideologi komunisme untuk mewujudkan sebuah kemajuan dan keadilan sosial. 16)

15) Amat Johari Moain, Sejarah Nasionalisma Maphilindo (Malaysia, Philipina, Indonesia), Serikat Percetakan Utama Melayu Berhad, Kuala Lumpur, 1969. hal. 49.

16) Ibid.



Di Filipina, faham komunis untuk pertama kalinya mulai tersebar luas di wilayah pertanian di Luzon Tengah dan Selatan. Kondisi kehidupan petani di wilayah ini memang sangat menyedihkan. Mayoritas petani di wilayah ini tidak mempunyai tanah sendiri, kebanyakan tanah pertanian di wilayah ini dikuasai oleh para tuan tanah besar. Sehingga untuk menyambung hidupnya, maka terpaksa para petani harus bekerja pada tuan-tuan tanah tersebut, yang sering kali kurang memperhatikan, bahkan mengabaikan kepentingan-kepentingan para petani yang bekerja di lahan pertaniannya. Karena kondisi tersebut, faham komunis secara intensif mulai mendapat banyak pengikut di wilayah ini. Faham komunis yang bercita-cita mewujudkan suatu masyarakat yang lebih egaliter, dimana kekayaan dibagikan secara lebih merata dan adil, serta adanya pembatasan atas hak milik pribadi, telah memberikan sebuah obsesi kepada kaum tani di wilayah ini untuk merubah nasib mereka. Dalam kenyataan di lapangan, kaum tani yang terlibat dalam gerakan komunis pada masa ini memiliki sedikit sekali pengetahuan dan pemahaman mengenai ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme. Yang menjadi motivasi keterlibatan mereka pada dasarnya keluhan yang berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka. Selain basis penyebaran faham komunis berada di wilayah Luzon Tengah dan Selatan, ideologi komunis juga mulai mendapatkan pengikutnya di kalangan buruh di daerah-daerah perkotaan dan industri di Filipina. Walaupun begitu kuantitasnya belum sebanding

dengan pengikut komunis di wilayah Luzon Utara dan Selatan.

Gerakan komunis yang cukup terorganisir di Filipina diawali dengan pembentukan sebuah partai komunis yang dikenal dengan sebutan *Partido Komunista ng Philipinas* (PKP) pada tahun 1930. Sebagai ketua umum partai tersebut diangkatlah Crisanto Avengelist. Partai komunis di Filipina ini berniat menjadikan negara Filipina menjadi negara komunis melalui usaha perjuangan bersenjata. Beberapa tahun kemudian atas prakarsa PKP, kaum komunis Filipina untuk pertama kalinya mengadakan pemberontakan bersenjata pada tahun 1931 dan tahun 1935. Tetapi berhasil dipadamkan oleh pihak Amerika Serikat. Pada dasarnya pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dunia (krisis malaise) pada tahun 1929-1930. Krisis ekonomi yang melanda dunia pada waktu itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan perekonomian Filipina. Karena pengaruh krisis ekonomi dunia pada waktu itu, kehidupan perekonomian Filipina mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup serius.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai wilayah di Filipina sering timbul aksi-aksi massa yang menuntut pemerintah Amerika agar segera memperbaiki kondisi perekonomian Filipina. Di lain pihak, dalam usahanya meredam keresahan-keresahan di kalangan masyarakat luas, pemerintah Amerika cenderung menggunakan cara-cara represif. Sikap pemerintah Amerika yang demikian inilah yang pada

dasarnya mengakibatkan timbulnya pemberontakan kaum komunis yang dipelopori oleh PKP. Setelah kegagalan pemberontakan ini, golongan komunis kemudian mendirikan sebuah organisasi militer yang bernama Barisan Rakyat (*People's Front*) yang diketuai oleh Pedro Abad Santos. Barisan Rakyat (*People's Front*) yang berafiliasi dengan PKP ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung kekuatan-kekuatan revolusioner rakyat guna memperkuat perjuangan golongan sayap kiri Filipina dan berfungsi sebagai sayap militer PKP. 17)

Secara umum, gerakan komunis yang dipelopori oleh PKP ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip Marxisme secara dogmatis dalam pola perjuangan mereka. Para tokoh partai yang notabene tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, kurang memperhitungkan kondisi obyektif dan situasi konkret Filipina pada masa itu. Strategi-strategi dan pola perjuangan kaum Bolsyewik Rusia ketika melakukan revolusi pada tahun 1917 mereka jadikan pedoman untuk melancarkan revolusi serupa di Filipina. Akibatnya, banyak program-program dan strategi-strategi partai yang kurang berhasil secara efektif, karena pada kenyataannya situasi Rusia di tahun 1917 berbeda dengan situasi Filipina di tahun 1930-an. Ditinjau dari segi kualitasnya, PKP dalam usahanya menyebarluaskan ideologi komunis atau melaksanakan proses

17) Ibid., hal. 50

indoktrinasi paham komunis dikalangan kaum tani dan buruh, juga kurang menekankan usaha-usaha yang terkoordinir dan terkontrol secara rapih. Proses penyebaran ideologi komunis yang dilakukan melalui kursus-kursus kilat yang ditangani para kader partai yang masih belum memahami prinsip-prinsip ajaran komunis secara menyeluruh dan kurang menguasai metode-metode indoktrinasi ternyata kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga di era tahun 1930-an gerakan komunis belum menjadi sebuah ancaman besar bagi pemerintah Amerika Serikat maupun keutuhan negara Filipina sendiri.

Sementara itu, pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia II mulai berkecamuk di Eropa, setelah Jerman berhasil menduduki Polandia dengan kekuatan militer. Dua tahun kemudian Perang Dunia II mulai menjalar ke Pasifik, setelah Jepang melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan Militer Amerika Serikat di Pearl Harbour pada bulan Desember 1941. Setelah berhasil "membungkam" pangkalan militer Amerika Serikat tersebut yang dianggap Jepang akan merintangi rencananya untuk menguasai kawasan Asia Tenggara, pada awal tahun 1942 Jepang mulai melaksanakan rencananya menguasai kawasan Asia Tenggara. Filipina yang pada waktu itu dikuasai Amerika Serikat akhirnya secara keseluruhan jatuh ke tangan Jepang pada bulan Mei 1942. Kemudian angkatan bersenjata Amerika Serikat dibawah pimpinan Jenderal Mac Arthur menyingkir ke Australia.

Dengan didudukinya Filipina oleh Jepang, maka kekuasaan Amerika Serikat atas Filipina beralih ke pihak bala tentara Jepang. Segera setelah berhasil menduduki Filipina, Jepang kemudian membentuk sebuah pemerintahan sipil dengan menggunakan orang-orang Filipina yang pro Jepang. Seorang Filipina, Jose P. Laurel diangkat menjadi presiden pemerintahan sipil tersebut. Tetapi secara de facto, pemerintahan sipil tersebut hanyalah sebuah pemerintahan boneka bentukan Jepang. Seluruh urusan kenegaraan dan pemerintahan selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pihak militer Jepang. Sedangkan kaum nasionalis Filipina pada waktu itu bersama-sama dengan sisa-sisa pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam kelompok gerilyawan USAFFE (*United States Armed Forces in the Far East*) tetap melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang. Dalam usaha perlawanan terhadap Jepang ini, peranan golongan komunis Filipina, juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Dari pangkalan mereka di wilayah Luzon Tengah dan Luzon Selatan, kaum gerilyawan komunis secara sporadis melakukan serangan-serangan gerilya terhadap kedudukan-kedudukan militer Jepang di seluruh Pulau Luzon. Dilihat dari kondisi sosial-politik pada waktu itu, usaha perlawanan golongan komunis ini memang diakibatkan oleh adanya penerapan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu militer Jepang di Filipina untuk menghadapi serangan balik pasukan Sekutu. Dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan persediaan pangan bagi bala tentara Jepang

di kawasan Asia pada umumnya dan Filipina pada khususnya pihak militer Jepang mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan golongan elite pemilik tanah di Filipina, terutama di wilayah Pulau Luzon yang terkenal sebagai "lumbung padi" Filipina. Melalui kerja sama dengan golongan elite pemilik tanah pertanian ini, pihak militer Jepang dengan mudah mendapatkan bahan pangan yang mereka butuhkan. Selain itu pihak Jepang juga memperoleh keuntungan-keuntungan lain yang bersifat ekonomis. Di lain pihak golongan elite pemilik tanah pertanian juga memperoleh keuntungan besar dari kerja sama ini. Mereka mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan ekstra dari pihak militer Jepang dari gangguan para pengacau keamanan, terutama kaum gerilyawan komunis yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Melalui kerja sama ini juga, secara politis kepentingan-kepentingan kaum elite pemilik tanah lebih diperhatikan oleh pihak militer Jepang. Akan tetapi, usaha kolaborasi dan kerja sama yang terjalin antara pihak militer Jepang dengan golongan elite pemilik tanah Filipina berdampak buruk bagi kepentingan dan hak-hak para petani kecil Filipina. Karena merasa mendapat "dukungan" dari pihak Jepang, golongan elite pemilik tanah cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merugikan petani kecil/penggarap yang bekerja padanya. Dengan dalih untuk memenuhi persediaan bahan pangan bala tentara Jepang yang cukup besar, para elite pemilik tanah cenderung menekan upah dan memperpanjang jam kerja para

petani kecil yang bekerja di wilayah pertaniannya. Kondisi semacam inilah yang terutama memberikan motivasi golongan komunis untuk melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan Jepang di Filipina.

Untuk melakukan perlawanan lebih intensif terhadap Jepang, golongan komunis yang dipelopori oleh PKP pada pertengahan tahun 1942 mendirikan organisasi militer yang dikenal dengan sebutan Hukbalahap (*Hukbo ng Bayan Laban Sa Hapon = Tentara Rakyat Anti Jepang*), sebagai ganti organisasi militer Barisan Rakyat (*People's Front*).¹⁸⁾ Sebagai sayap militer PKP, pasukan Hukbalahap yang mempunyai wilayah operasi terutama di bagian tengah Pulau Luzon oleh banyak pihak memang dicap mempunyai "ideologi politik kiri", meskipun anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Sesuai dengan namanya yang merupakan kumpulan dari rakyat bersenjata yang anti Jepang, anggota pasukan Hukbalahap tidak semuanya beraliran komunis. Yang menjadi motivasi bergabungnya kebanyakan anggota Hukbalahap adalah kebencian mereka terhadap Jepang. Tetapi apapun anggapan banyak pihak mengenai ideologi politiknya, kerja sama antara laskar Hukbalahap dengan kelompok perlawanan terhadap Jepang lainnya cukup erat, bahkan gerakan Hukbalahap dipuji karena milintasinya yang luar biasa. Selama Perang Dunia kedua ini, PKP juga menjalin kerja sama dengan Partai Komunis Cina (CCP). Partai Komunis Cina

¹⁸⁾ Ibid., hal. 51-53

banyak mengirimkan penasehat-penasehat militer dan perlengkapan-perengkapan militer yang dibutuhkan Hukbalahap.

Ketika Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan dalam berbagai pertempuran di kawasan Asia dan Pasifik melawan pasukan Sekutu, pada bulan September 1944 PKP mengadakan sebuah konperensi yang membicarakan peranan golongan komunis selama masa pendudukan Jepang. Dalam konperensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh politik PKP dan pimpinan tertinggi Hukbalahap ini diputuskan bahwa PKP akan mengalihkan berbagai gerakan perlawanan anti Jepang menjadi gerakan politik dengan ruang lingkup perjuangan lebih luas yang bisa menggerakkan suatu perubahan atau reformasi politik dan ekonomi di negara tersebut. Tiga garis besar rencana telah dihasilkan untuk menentukan masa depan Filipina. Pertama, mencegah orang Filipina yang berkolaborasi dengan Jepang untuk mendapatkan posisi posisi politis penting. Kedua, melakukan kampanye agar kelak bisa lepas dari dominasi Amerika Serikat. Ketiga, mewujudkan sebuah pemerintahan Filipina merdeka yang lebih mementingkan masyarakat kelas bawah dan menengah ketimbang golongan kaya dan orang asing. Secara keseluruhan konperensi tersebut menghasilkan pembentukan *Democratic Alliance (DA)*, atau Aliansi Demokrasi yang bertujuan menampung semua golongan dan kekuatan pro komunis.

Gerakan DA ini dianggap sebagai penjelmaan dari cita-cita komunisme di Filipina. 19)

Setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat di Filipina pada bulan Februari 1945, peranan pasukan Hukbalahap dalam gerakan perlawanan terhadap Jepang tidak mendapat pengakuan sebagaimana mestinya. Mereka dianggap sebagai organisasi yang "anti demokrasi, berafiliasi terhadap gerakan komunis dan mempunyai kecenderungan Bolshevist". Sehingga tidak heran, ketika Jepang berhasil diusir dari Filipina, tentara Amerika Serikat dan gerilyawan nasionalis Filipina segera melucuti persenjataan laskar Hukbalahap. Setelah Filipina mendapat kemerdekaan penuh pada tanggal 4 Juli 1946 pemerintah Filipina mulai mengadakan pemilihan anggota Kongres. Enam orang wakil DA (*Democtratic Alliance*) yang mewakili Luzon Tengah berhasil memenangkan kursi dalam Kongres. Tetapi kemenangan ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina dukungan Amerika Serikat yang pada dasarnya tidak menyetujui aktifitas-aktifitas politik yang mempunyai dimensi komunisme. Tindakan yang dilakukan pemerintah Filipina ini akhirnya menimbulkan kekecewaan pada para petani dan organisasi-organisasi tani dari Luzon Tengah. Situasi setempat juga tidak menolong keadaan, karena banyak terjadi bentrokan-bentrokan antara aparat keamanan dan

19) Kustigar Nadeak dan Atmadji, Revolusi Damai dan Rekaman Kemelut di Filipina, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hal. 201

para petani atau kelompok-kelompok tani yang pasti bersimpati dengan wakil-wakil mereka di DA (*Democratic Alliance*). Kelompok ini oleh pemerintah Filipina secara umum dianggap sebagai golongan "Huk". 20)

Puncak dari tindak kekerasan adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan Juan Feleo, seorang tokoh gerakan tani pro komunis dari Nueva Ecija, Luzon Tengah. Pembunuhan tersebut diduga didalangi oleh pemerintah yang tidak menyenangi gerakan mereka, dan inilah awal dari pemberontakan bersenjata banyak petani dan bekas-bekas gerilyawan Hukbalahap dari Luzon Tengah. 21)

Pemberontakan golongan komunis yang dipelopori oleh PKP dan sayap militernya, Hukbalahap ini diawali dengan diadakannya pertemuan di wilayah Candaba, Pampanga. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh PKP dan pemimpin-pemimpin gerakan tani pro komunis di seluruh Filipina tersebut, berhasil menelorkan sebuah solusi untuk mempersatukan seluruh kekuatan revolusioner pro komunis untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan pusat Filipina. Salah seorang tokoh komunis yang terlibat dalam pertemuan ini, Silvestre Liwanag, mengatakan bahwa, pemberontakan ini dilancarkan semata-mata untuk membela diri dan bukan untuk tujuan ofensif. Hal ini dilakukan karena pemerintah Filipina tidak memperhatikan hak-hak

20) Ibid., hal. 202

21) Ibid

kaum tani, terutama di wilayah Pulau Luzon. Pertemuan di Candaba ini juga membentuk dua komando yang diberi nama Central Luzon Command, yang mempunyai wilayah operasi di Luzon Tengah, dan Southern Luzon Command, yang mempunyai wilayah operasi di Luzon Selatan. Pertemuan itu juga memilih Luis Taruc sebagai panglima tertinggi dan Casto Alejandrino sebagai wakil panglima tertinggi. 22)

Menurut Marcos G. Soliman, yang menulis artikel "*The Local Communist Movement Today*" dalam buku *Foundation and Dynamics of Filipino Government and Politics*, sebuah dokumen yang dirampas dari seorang tokoh komunis yang bernama Jesus Lava membuktikan bahwa dalam usaha pemberontakannya, PKP-Hukbalahap berusaha membangun ikatan dan kerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Komunis Cina (CPP). Selain itu, dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa sejumlah tokoh PKP pernah datang ke Indonesia dan Cina untuk mengadakan kontak guna usaha kerja sama tersebut. 23)

Puncak dari gerakan pemberontakan PKP-Hukbalahap terjadi antara tahun 1949-1951. Sepak terjang laskar Hukbalahap yang merupakan kekuatan inti dari golongan komunis di wilayah Luzon tidak dapat dicegah lagi oleh kekuatan pemerintah. Pada masa-masa ini pemberontakan PKP-Hukbalahap sudah menjadi ancaman serius bagi pemerin-

22) *Ibid.*, hal. 202-203

23) *Ibid.*, hal. 158

tahan Filipina, karena selain mendapat dukungan dari penduduk pedesaan yang kebanyakan petani, organisasi pasukan Hukbalahap disusun mirip dengan organisasi militer pada umumnya. Organisasi militer pasukan Hukbalahap dibagi dalam sejumlah batalyon, dengan kekuatan tiap-tiap batalyon 500 sampai 700 serdadu dibawah pimpinan seorang *field commanders* (komandan batalyon).

Tetapi aksi pemberontakan ini mulai menurun pada akhir tahun 1951, ketika gerakan ini mulai kesulitan mencari kader-kader baru. Semakin sulit bagi mereka untuk mencari petani-petani muda untuk bergabung pada salah satu *field commanders* (komandan batalyon), karena jumlah penduduk di Luzon Tengah dan Selatan sangat terbatas. Selain itu, tekanan pihak militer Filipina, yang dibantu Amerika Serikat dalam masalah pendanaan dan perlengkapan militer, semakin mendesak posisi-posisi laskar Hukbalahap di seluruh wilayah Luzon. Secara politis, faktor lain yang menyebabkan menurunnya kekuatan dan aksi PKP-Hukbalahap adalah diangkatnya Ramon Magsaysay menjadi presiden Republik Filipina pada tahun 1953. Ramon Magsaysay yang menjalankan program-program pembangunan yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan petani, akhirnya memberikan pukulan telak bagi usaha-usaha propaganda dan kampanye tokoh-tokoh PKP yang selalu mengambil tema perbaikan kehidupan kaum tani sebagai isu penting.

Akhirnya kemenangan politik yang besar berhasil dipetik pemerintah Filipina pada tahun 1954. Setelah

merasa kekuatannya "habis," panglima tertinggi pemberontakan PKP-Hukbalahap, Luis Taruc, pada bulan Mei 1954 menuju ke Filipina untuk menyerahkan diri kepada presiden Ramon Magsaysay. Luis Taruc kemudian oleh pemerintah Filipina dihukum 15 tahun penjara.

Gerakan pemberontakan yang dipelopori oleh PKP-Hukbalahap ini tidak pernah dinyatakan berakhir secara resmi, dan mereka juga tidak pernah memberikan pernyataan mengenai eksistensi gerakan mereka. Tetapi secara militer, tahun 1956 boleh dikatakan merupakan akhir dari pemberontakan PKP-Hukbalahap, karena praktis kekuatan yang ada di kawasan Luzon Tengah maupun Selatan hanya tinggal puluhan orang saja.

PKP secara formal mati, ketika presiden pengganti Magsaysay, yaitu Carlos P. Garcia, mengeluarkan *Republic Act No. 1700*, yang melarang berdirinya PKP dan semua organisasi sejenis lainnya. Setelah keputusan pemerintah ini, tokoh-tokoh PKP kemudian bergerak di bawah tanah, terutama dalam membina kader-kader partai yang lebih muda. ²⁴⁾ Tetapi menjelang akhir tahun 1960-an, atau tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos gerakan radikal golongan komunis mulai menunjukkan kebangkitannya kembali.

²⁴⁾ *Ibid.*, hal. 211

C. Peranan Penting Jose Maria Sison Dalam Proses Berdirinya Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*)

Membicarakan gerakan komunis di Filipina pada era pemerintahan Marcos, tanpa menyebut peranan Jose Maria Sison merupakan suatu kekurangan yang cukup besar. Figur kharismatik Jose Maria Sison seperti sudah terafiliasi dalam pergerakan komunis pasca kepemimpinan tokoh-tokoh PKP. Melalui prakarsa Jose Maria Sison inilah pada tanggal 26 Desember 1968 berdirilah sebuah partai komunis baru di Filipina yang mempunyai corak dan strategi-strategi perjuangan yang cukup berbeda dengan partai komunis sebelumnya. Menurut pandangan Sison, partai komunis sebelumnya, yaitu PKP mempunyai banyak kelemahan-kelemahan yang akhirnya memberikan dampak buruk bagi proses perjuangan partai. Salah satu kelemahan besar PKP menurut Sison, adalah segi dogmatismenya, asas penerapan prinsip-prinsip komunis menurut Karl Marx tanpa "mengkhhususkan pada kondisi yang konkret." Selain itu perjuangan politik yang lebih mengandalkan kemampuan fisik dirasa tidak cukup, diperlukan suatu landasan perjuangan yang lebih berkonsepsi. Melalui partai komunis baru yang dibentuknya, yaitu CPP, Sison berusaha menerapkan suatu formula baru dan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mencapai keberhasilan perjuangan. Kemampuannya dalam melakukan analisa kritis terhadap kegagalan PKP dan mulai menerapkan taktik penyesuaian dengan lingkungan politik

yang sedang berubah, Sison berusaha menetapkan sebuah pola perjuangan mengalihkan kekalahan dan mewujudkan kemenangan.

Jose Maria Sison lahir dalam sebuah keluarga kelas menengah Filipina pada tanggal 8 Februari 1939 di Cebu, Ilocos Sur. Ibunya seorang guru dan ayahnya yang bernama Salustino, yang meninggal pada tahun 1958 adalah bagian dari elit tanah Filipina. Pamannya seorang uskup yang cukup terkemuka, dan saudara satu-satunya adalah seorang dokter yang bekerja di Los Angeles. Setelah lulus dari Lentrana College tahun 1956, Sison kemudian mendapat gelar B.A. dari University of the Philippines (UP) pada tahun 1960. Setelah itu Sison mulai mengajar di UP. Bidang ilmu politik merupakan salah satu keahlian utamanya. 25)

Sejak masih menjadi mahasiswa sampai menjadi staf pengajar di UP, Sison sudah tertarik dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip komunis yang dibaca melalui karya-karya Karl Marx. Secara berangsur-angsur prinsip-prinsip ajaran Karl Marx semakin diperdalam dan diyakininya secara luas dalam standar nilai-nilai Katolik. Di UP inilah Sison bertemu dengan Julie seorang staf perpustakaan yang nantinya menjadi pasangan dalam hidup dan perjuangannya.

25) Eduardo Lachica, The Huks : Philippine Agrarian Society In Revolt, Praeger, New York, 1971, hal. 177

Ketika Sison mulai meniti karir dalam bidang akademis di UP, pada awal tahun 1960-an Filipina mulai dilanda gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh para mahasiswa radikal. Proses politisasi dan radikalisasi mahasiswa ini pada dasarnya merupakan hasil pemikiran beberapa aliran intelektual yang terangkum dalam slogan "oposisi terhadap imperialisme, feodalisme dan fasisme yang muncul dalam awal tahun 1960-an. Yang paling penting di antara ketiga momok ini adalah imperialisme, yang menurut pandangan kelompok radikal merupakan penyebab dari kedua momok lainnya. Imperialisme adalah musuh utama nasionalisme Filipina. 26)

Sementara itu, Claro Recto (mantan senator) dan Renato Constantino (seorang penulis terkemuka) yang merupakan tokoh terkemuka di kalangan kaum nasionalis Filipina, dalam karangan-karangannya yang menggunakan bahasa Inggris memaparkan betapa penyerapan kebudayaan dan gagasan-gagasan asing tanpa sikap kritis telah menyebabkan kemunculan identitas Filipina sejati menjadi terhambat. Menurut dua tokoh tersebut, penyerapan secara mutlak unsur-unsur asing akan menyebabkan terasingnya kaum intelektual dari tradisi dan rakyat mereka sendiri. 27)

26) Bresnan, hal. 168

27) Ibid., hal. 170

Semangat nasionalisme pada era tahun 1960-an yang pada mulanya dipelopori oleh golongan mahasiswa dan kemudian oleh golongan progresif militan dalam kubu oposisi dikobarkan oleh rasa sakit hati terhadap Amerika Serikat. Dalam bidang ekonomi, protes diarahkan terhadap *Bell Trade Act* tahun 1946. *Bell Trade Act* yang merupakan perjanjian antara Amerika Serikat - Filipina ini, memberikan hak-hak paritas terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber alam Filipina dan memberikan kesamaan hak antara investor Amerika Serikat dengan para pengusaha pribumi. Selain itu, dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat juga berkewajiban memberikan dana rehabilitasi dalam jumlah tertentu untuk pembangunan Filipina. Dalam praktek selanjutnya perjanjian ini diperpanjang sampai tahun 1974. Dalam bidang politik, protes ditujukan terhadap *Military Bases Agreement* tahun 1947 yang juga merupakan perjanjian antara Pemerintah Filipina dengan pihak Amerika Serikat. Dalam *Military Bases Agreement* tersebut, diputuskan bahwa Amerika Serikat memperoleh hak untuk mempunyai pangkalan militer di Subic dan Clark selama kurun waktu 99 tahun. Sedangkan Filipina akan memperoleh jaminan keamanan dan bantuan militer dari pihak Amerika Serikat. 28)

Keberadaan *Bell Trade Act* 1946 dan *Military Bases Agreement* 1947 mendapat kecaman keras sebagian besar

28) Ibid., hal. 18

rakyat Filipina, karena pada dasarnya kedua perjanjian tersebut memberikan konsesi-konsesi yang sangat menguntungkan pada pihak Amerika Serikat dalam bidang politik dan ekonomi. Sedangkan di lain pihak, Filipina kurang mendapatkan manfaat dari kedua perjanjian tersebut. Bahkan kedua perjanjian tersebut cenderung merugikan kepentingan Filipina dalam aspek-aspek tertentu. Dengan diberikannya kesamaan hak antara investor dan perusahaan Amerika dengan para pengusaha pribumi dalam hal penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam Filipina, maka eksistensi para pengusaha dalam negeri Filipina cenderung menjadi semakin terdesak. Selain itu, dengan adanya dua pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina, maka kemungkinan besar, Filipina sewaktu-waktu akan mendapat ancaman serangan dari musuh-musuh Amerika Serikat, terutama Uni Soviet dan sekutu-sekutunya. Secara historis, kedua perjanjian tersebut dilakukan oleh pemerintah Filipina pada waktu itu untuk memperoleh bantuan dana untuk membangun kembali Filipina yang rusak parah akibat Perang Dunia kedua. Untuk kepentingan tersebut, maka pemerintah Filipina terpaksa berpaling pada pihak Amerika Serikat, walaupun kemudian harus memberikan konsesi-konsesi tertentu untuk kepentingan Amerika Serikat.

Dalam gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh mahasiswa Filipina pada era tahun 1960-an, boleh dibilang Jose Maria Sison mempunyai peranan yang cukup menentukan. Ketika masih menjadi asisten pengajar di bidang sastra

Inggris di UP, Sison bersama temannya, Francisco Nemenzo, mendirikan Asosiasi Kebudayaan Mahasiswa UP (*SCAUP = Students Cultural Association of UP*) pada tahun 1959. Kelompok studi ini pada awalnya didirikan untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme Claro Recto dan Renato Constantino serta untuk menyerang "neoimperialisme" Amerika Serikat.

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok SCAUP ini mempersiapkan kesempatan untuk membentuk generasi radikal mahasiswa baru untuk berinteraksi dengan anggota-anggota PKP, dan menyebarkan ideologi komunisme ke kampus-kampus lain. Sejak dibentuknya tahun 1959, SCAUP menerima banyak kepercayaan di lingkungan mahasiswa. Melalui figur kharismatik Sison, SCAUP menarik banyak muka baru di kalangan mahasiswa radikal dan studinya bergerak pada subyek yang lebih penting, yaitu revolusi Marxis di negara-negara Asia yang miskin. Melalui prakarsa SCAUP dan organisasi-organisasi nasionalis lainnya, kadangkala Manila sering digoncang demonstrasi anti Amerika Serikat.

Tetapi prestasi utama dari karier politik Sison adalah berdirinya *Kabataan Makabayan (KM)*, atau Pemuda Nasionalis pada tahun 1964. Sison kemudian menjadi pemimpin organisasi mahasiswa tersebut. Pada awalnya, kebanyakan anggota *Kabataan Makabayan* adalah mahasiswa-mahasiswa radikal beraliran Marxis. Tetapi kemudian mulai banyak memasukkan pemuda-pemuda pedesaan miskin yang terutama berasal dari Luzon Tengah (bekas daerah basis

PKP). *Kabataan Makabayan* adalah upaya pertama dan paling berhasil dalam mempersatukan para radikal kelas menengah di kota-kota dengan kelompok petani, yang nantinya merupakan teladan bagi proses perjuangan CPP. Melalui *Kabataan Makabayan* datanglah banyak mahasiswa sebagai kader terdidik yang menyebarkan ideologi komunis di antara para petani miskin di seluruh negara dan mempersiapkan satuan-satuan gerilya bersenjata pada hubungan pertama di daerah pedalaman. Dengan dikontrol pertama kali oleh Sison, *Kabataan Makabayan* berusaha mengawinkan nasionalisme dan mencoba menunda ikatan komunisnya. 29)

Pada tahun 1965, kelompok-kelompok yang dipimpin oleh *Kabataan Makabayan* sering mengadakan demonstrasi anti Amerika Serikat pertama di jalan-jalan Manila. Mereka sangat berhasil dan menandai dibukanya periode protes yang panjang, dimana ukurannya berkembang dan intensitasnya bertambah sampai Presiden Marcos menerapkan Undang-Undang Darurat Perang tahun 1972. Sasaran khususnya adalah keberadaan basis-basis militer Amerika Serikat, yang telah lebih kontroversial karena digunakan sebagai pusat logistik untuk operasi militer Amerika Serikat guna menumpas perlawanan golongan komunis Vietnam. 30)

29) Lihat Chapman, *Inside The Philippine Revolution*, W.W. Norton & Company, New York. 1990, hal. 73. Lihat juga Lachica, hal. 178

30) Lihat Chapman, hal. 74

Sementara di seluruh Manila dilanda demonstrasi anti Amerika Serikat oleh para mahasiswa nasionalis komunis dan non komunis, PKP yang merupakan suatu lembaga yang pernah mempunyai peranan besar dalam sejarah politik Filipina sayap kiri sedang berada pada titik yang paling lemah. Selain telah divonis sebagai partai ilegal oleh pemerintah, pengaruh PKP telah semakin menurun di kalangan golongan muda dan kaum tani. Bertitik tolak dari keadaan tersebut, PKP telah meluncurkan kebijaksanaan baru yang disebut *Single File*, dimana seorang anggota partai hanya dapat mengetahui dua anggota lainnya saja. Tujuan dari kebijaksanaan semacam ini adalah untuk mempertahankan kepemimpinan dan perjuangan di bawah tanah sambil menunggu hari-hari yang bagus untuk "bangkit kembali."

Pimpinan senior PKP, Jesus Lava mulai menerima suasana umum baru, terutama penggunaan nasionalis muda yang mulai berbaris di jalan-jalan untuk melawan imperialis me Amerika Serikat. Lava dan tokoh-tokoh PKP lainnya mulai memimpikan revitalisasi partai komunis, dengan kemungkinan menerobos kelompok-kelompok nasionalis dan menambahkan pola perjuangan baru dengan versi persatuan front. Jelas bahwa ini tidak dapat dicapai oleh para tokoh reguler partai yang dikenal umum, dan PKP mulai mencari muka baru untuk menjalankan tugas kepercayaan

tersebut. ³¹⁾ Kemudian mereka mulai mengarahkan pandangannya kepada figur kharismatik Jose Maria Sison.

Perkenalan Sison dengan tokoh-tokoh senior PKP dimulai ketika pada tahun 1962 Sison bertemu dengan Jesus Lava. Akhirnya melalui pendekatan-pendekatan intensif, Sison berhasil direkrut dalam kubu PKP. Pada tahun 1967, Sison sudah berada pada puncak pimpinan PKP sebagai pengorganisasi dan perencana partai serta anggota politbiro. Selain menjadi anggota resmi PKP, Sison juga mengambil bagian dalam kelompok politik lain. Pada tahun 1967, Sison diangkat sebagai sekretaris Pergerakan Kemajuan Nasionalisme (MAN = *Movement for the Advancement of Nationalism*), dimana Lorenzo Tanada sebagai ketuannya. MAN ini dibentuk untuk tujuan memurnikan bangsa Filipina dari pengaruh-pengaruh asing.

Ketika berada dalam tubuh PKP, Sison mulai menyadari adanya berbagai kelemahan dalam pola perjuangan PKP. Kemudian Sison mulai mempelajari sejarah PKP dan merumuskan berbagai kelemahan, serta mempersiapkan koreksi-koreksi besar atas strategi umum perjuangan partai tersebut. Keberhasilan Cina mendirikan negara komunis dan keberhasilan negara-negara dunia ketiga melancarkan revolusi komunis dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Mao, seperti misalnya, di Kuba dan di Vietnam, telah menjadi inspirasi Sison untuk menerapkan pola revolusi

³¹⁾ Ibid., hal. 72

serupa. Berkembangnya Maoisme segera dijadikan teladan bagi Sison untuk menerapkan pola revolusi baru di Asia pada umumnya dan di Filipina pada khususnya. Berkat pengaruhnya yang besar dalam *Kabataan Makabayan*, para pengikut Marxis muda Filipina mulai memandang Mao Zedong sebagai pedoman.

Pada tahun 1967, setelah merampungkan teori-teori dan analisa-analisa kritisnya tentang sejarah dan pola perjuangan PKP, Sison mulai melancarkan kritik secara terbuka terhadap PKP. Sison menghendaki PKP meninjau sejarahnya, memperbaiki berbagai kelemahan selama ini dan mempersiapkan sebuah era baru. Selain itu Sison juga mengkritik kepemimpinan Komite Lava yang memprakarsai kebijaksanaan *Single File* yang melemahkan kedudukan partai. Para sesepuh partai segera menolak segala kritik dari Sison. Bahkan mereka mengancam Sison untuk menghentikan penggalangan golongan muda Marxis yang memberi dukungan pada Sison.

Dalam mengadakan reaksi, pada bulan April 1967, Sison didukung mayoritas golongan muda Marxis mendirikan alternatif politbiro. Kemudian melalui pernyataan May Day yang disiarkan oleh Agen Berita Hsihua dan Radio Beijing, Sison mengecam kelompok Lava yang menolak peninjauan kembali pola perjuangan partai serta mengambil prinsip-

prinsip ajaran Mao sebagai pedoman perjuangan kaum komunis Filipina selanjutnya. 32)

Pada tanggal 26 Desember 1968, pada hari ulang tahun ke-75 Mao Zedong, Sison dan 11 intelektual muda radikal mendirikan partai komunis baru, *Communist Party of Philippines* (Partai Komunis Filipina) di Propinsi Pengasinan. Pendirian partai tersebut dengan resmi disebut "Congress of Reestablishment" untuk menandai bahwa tindakan ini bukanlah merupakan gelombang pengkianatan, tetapi merupakan penggabungan kembali suatu partai komunis Filipina. Pertemuan di propinsi Pengasinan ini juga mengesahkan sebuah dokumen bertajuk, "Rectify Errors and Rebuild The Party" (Memperbaiki Kesalahan dan Membangun Kembali Partai). Secara istimewa, dokumen ini berisi koreksi-koreksi besar atas tiga kesalahan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Lava bersaudara dari partai komunis lama (PKP), kesalahan-kesalahan yang sudah menimbulkan kehancuran pada tentara Hukbalahap. 33)

Satu dari kesalahan berat PKP pada masa kepemimpinan Lava bersaudara adalah penerapan taktik militer kemenangan dini (quick victory). Kebijaksanaan militer ini memproyeksikan sebuah serangan berskala besar secara tiba-tiba untuk menghancurkan pemerintah pusat di ibu

32) Richard J. Kessler, Rebellion and Repression in the Philippines, Yale University Press, Amerika, 1989, hal. 38

33) Champman, hal. 77-78

kota. Pada hal pada waktu itu kekuatan tentara Hukbalahap belum sebanding dengan kekuatan tentara pemerintah yang dibantu oleh Amerika Serikat. Akibat penerapan strategi militer ini, tentara Hukbalahap mengalami kekalahan telak pada awal tahun 1950-an.

Menurut pandangan Sison yang mengambil konsep strategi militer Mao, perang gerilya merupakan prinsip fundamental yang harus dilaksanakan. Perang gerilya akan dilaksanakan dalam tiga fase panjang, yaitu : "strategi defensif," bila kekuatan tentara merah berkembang selama peperangan dan penyerangan hanya dalam skala kecil, menggrebek dan menyergap; "strategi mengunci," bila NPA memiliki keseimbangan kekuatan dan konfrontasi yang hampir sama dengan kekuatan musuh; dan "strategi menyerang", bila berkurangnya penjagaan kota dan kesiagaan militer pemerintah, kemudian disusul serangan serentak dari seluruh front untuk sebuah target tunggal = kemenangan. 34)



34) Leonard Davis, The Philippines : People, Poverty and Politics, St. Martin's Press, New York, 1987, hal. 108. Lihat juga Chapman, hal. 108.

Kesalahan kedua PKP adalah kekeliruan dalam memahami alam politik tentang gaya perang gerilya. Rakyat harus mengerti alasan untuk apa mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Melalui usaha ini motivasi rakyat untuk melakukan perlawanan akan dapat terbentuk. Tentara merah bukan hanya sebagai kekuatan perang tetapi juga bertugas sebagai pendidik bagi para petani untuk menjadi pengikut gerakan komunis. Tetapi untuk memperoleh basis massa dan dukungan rakyat, PKP cenderung melakukan tindakan-tindakan sebaliknya. PKP mempunyai kader-kader yang kurang berkualitas, banyak yang belum memahami teori-teori Marxisme dan teknik-teknik indoktrinasi. Sehingga usaha-usaha indoktrinasi yang dilakukan kader-kader PKP sering tidak bisa dipahami oleh kaum tani. Bahkan para tentara Huk sering melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada kaum tani untuk bergabung dalam gerakan mereka.

Kesalahan ketiga yang dilakukan oleh PKP adalah penerapan strategi perjuangan dalam bidang militer dan politik dengan tidak mengindahkan unsur geografis kepulauan Filipina. Strategi militer PKP yang memproyeksikan target tunggal untuk menghancurkan pemerintah pusat melalui serangan besar-besaran dari pangkalan tunggal mereka di Luzon Tengah mengakibatkan pasukan pemerintah mudah menerapkan strategi serangan balik. Dengan mengerahkan dua kekuatan besar di wilayah sekitar Manila dan wilayah Luzon Tengah pasukan pemerintah dengan mudah menghancurkan kekuatan pasukan Huk. Selain itu basis politik

dan basis massa yang hanya dibangun di wilayah Luzon Tengah kurang efektif untuk proses perlawanan dan perjuangan selanjutnya. Menurut Sison, unsur geografis kepulauan Filipina akan membawa keuntungan dalam proses perjuangan. Basis gerilya dan basis massa yang "disebarkan" ke berbagai pulau di Filipina akan mempunyai fungsi sebagai "alat pengepung" yang cukup efektif. Melalui penyebaran front-front perjuangan di berbagai pulau, pemerintah akan dipaksa untuk membagi perhatian dan kekuatannya. Apabila kekuatan seluruh front perjuangan sudah sebanding dengan kekuatan pemerintah, kedudukan pemerintah pusat akan mudah dikuasai melalui serangan secara serentak dari berbagai front.

Setelah berhasil membentuk sebuah partai komunis baru di Filipina yang beraliran Maoisme, Sison pada tahun 1970 mengeluarkan sebuah buku pedoman atau "kitab suci" bagi usaha perjuangan partai komunis yang baru. Buku pedoman tersebut, yang berjudul *Philippine Society and Revolution* merupakan hasil karangan Sison dengan nama samaran Amando Guerrero. Buku itu pada dasarnya merupakan interpretasi atau penafsiran ajaran Marxisme yang disesuaikan dengan situasi konkret Filipina dan merupakan pedoman pelaksanaan revolusi Maois. Adapun inti dari isi *Philippine Society and Revolution* dapat dijelaskan sebagai berikut: 35)

35) Lihat Davis, The Philippines, hal. 194-195

Pada dasarnya, revolusi demokrasi rakyat adalah revolusi demokrasi borjuis dan bukan revolusi proletar. Ini merupakan revolusi demokrasi melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi, bukan revolusi proletariat untuk mengganti kapitalisme dengan sosialisme.

Karena revolusi demokrasi pada dasarnya adalah revolusi demokrasi borjuis, dan bukan revolusi proletarian, sekalipun ada di bawah kepemimpinan kaum proletar, maka pemerintahan yang dibentuk bukan pemerintahan proletarian, melainkan pemerintahan koalisi demokrasi dari semua kekuatan anti imperialis dan anti feodal. Basis kelas pemerintahan koalisi demokrasi akan menjadi kelompok revolusioner dari semua kelas revolusioner dalam masyarakat Filipina. Artinya revolusi demokrasi rakyat menjadi aksi terpadu dari kelas pekerja, kaum tani, kaum borjuis kecil dan kaum borjuis nasional, serta kekuatan anti imperialis dan anti feodal lainnya, dalam menyulut perang revolusioner untuk mengorganisasikan kekuatan bangsa. Untuk memecahkan problem dasar yang muncul dan kontradiksi-kontradiksi dasar dalam masyarakat, yang dibutuhkan adalah semangat perjuangan, bukan hanya formal saja, tetapi partisipasi aktif keempat kelas revolusioner dalam membentuk kekuatan politik demokrasi. Ketidakikutsertaan salah satu kelas akan mengakibatkan kegagalan revolusi.

Apa yang akan menjadi tujuan pemerintahan koalisi demokrasi? Bergantung pada komposisi kelas koalisi revolusioner, akan menuju sosialisme atau kapitalisme. Semua itu tergantung bagaimana kekuatan kelas-kelas revolusioner secara efektif memimpin koalisi demokrasi dan seluruh masyarakat.

Melihat gerakan komunis di Filipina setelah tahun 1968, di bawah kepemimpinan Jose Maria Sison, kita akan mendapati dua prestasi besar yang berhasil diraih. Prestasi yang pertama adalah pembentukan hubungan atau interaksi yang erat antara kelas menengah (golongan rohaniwan,

mahasiswa dan kaum intelektual) di satu pihak dengan kaum tani dan buruh di pihak lain. Hubungan antara kelas menengah dengan golongan tani dan buruh yang nota bene merupakan golongan masyarakat lapisan bawah dalam sebuah wadah perjuangan untuk sebuah revolusi komunis merupakan gejala yang luar biasa dalam sejarah Filipina. Prestasi yang kedua adalah memasukkan gerakan nasionalisme tahun 1960-an ke dalam lingkup perjuangan kaum Marxis. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Banyak pengamat politik mengatakan, hal ini bisa terjadi karena kaum nasionalis Filipina tahun 1960-an yang mayoritas terdiri dari kelas menengah dan terpelajar, beranggapan bahwa kubu golongan komunis merupakan kubu oposisi yang paling radikal yang akan mampu menyuarakan dan mewakili aspirasi perjuangan mereka. 36)

D. Faktor-faktor Yang Mendorong Berdirinya Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*)

Kebangkitan kembali gerakan komunis di Filipina yang dipelopori oleh golongan menengah dan terpelajar Filipina pada akhir tahun 1960-an, akhirnya membuat gerakan ini menjadi ancaman lagi bagi integritas dan stabilitas pemerintahan Filipina. Namun tidak ada revolusi yang diilhami paham Marxis dapat menyatakan diri sah tanpa mendapat dukungan besar dari golongan petani dan buruh,

36) Lihat Chapman, hal. 83.

mengingat bahwa perjuangan tersebut dikatakan demi kepentingan mereka. Dalam konteks ini, para pemimpin CPP yang berasal dari golongan menengah ternyata berhasil menggalang dukungan kaum petani, para anggota serikat-serikat kerja, dan juga kaum urban yang miskin. Mereka juga berhasil memobilisasikan orang-orang yang menjadikan diri mereka sendiri pemimpin berbagai kelompok itu, dan yang sudah lebih dahulu menjadi terkenal sebelum bergabung dengan gerakan revolusioner. Melihat kondisi tersebut, gerakan radikal golongan komunis kali ini mempunyai kemungkinan untuk dengan pesat membangun organisasi yang meluas ke seluruh wilayah negara.

Untuk menjamin kelangsungan aksi yang terkoordinasi, para simpatisan golongan sipil komunis dari kelas menengah sering mengadakan perjalanan dari pulau ke pulau, sehingga terjalin rantai komunikasi bagi CPP. Sementara itu suatu kelompok intelektual yang tangkas berbicara berperan sebagai propagandis revolusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dukungan golongan menengah dan terpelajar ini merupakan salah satu kelebihan gerakan komunis selama masa kekuasaan Marcos, dibandingkan dengan gerakan PKP-Hukbalahap yang merupakan generasi pendahulu mereka.

Keuntungan-keuntungan yang dipetik gerakan komunis dari kepemimpinan mereka yang modern dan berasal dari golongan menengah diperbesar lagi oleh ciri-ciri pra-modern dari rezim Marcos. Setelah tahun 1972, rezim

Marcos semakin banyak mengandalkan nilai-nilai, rangsangan-rangsangan dan cara-cara memerintah yang kuno, berlainan halnya dengan strategi yang dianut golongan Marxis. Hal-hal tersebut, meski efektif untuk membuat Marcos tetap berkuasa, di pihak lain cenderung merongrong kemampuan rezimnya untuk menarik simpati masyarakat umum, yang merupakan prakondisi bagi suatu pemerintahan yang dapat berjalan lancar.

Apabila diamati dan dicermati lebih mendalam, kebangkitan kembali usaha radikalisasi dan politisasi gerakan komunis pada akhir tahun 1960-an dan kemudian mencapai puncaknya dengan dibentuknya sebuah partai komunis baru di Filipina, keberadaannya memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari situasi yang berkembang pada waktu itu. Ada beberapa faktor yang dilatarbelakangi situasi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang pada saat itu di Filipina yang mendorong bangkitnya kembali gerakan komunis yang ditandai dengan berdirinya partai komunis baru, CPP (*Communist Party of Philippines*). Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Filipina, semenjak kemerdekaannya sampai dekade tahun 1960-an yang tidak menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, bahkan mendorong semakin terabaikannya kepentingan rakyat kecil.

Perjalanan historis Bangsa Filipina mengisyaratkan bahwa suatu akibat yang paling besar dari kolonisasi gaya Iberian (dalam hal ini Spanyol) adalah

pembentukan kelompok elite pertanian yang berdasar pada konsentrasi pemilikan tanah. Selama berabad-abad, sejak kolonisasi Spanyol dan Amerika sampai kemerdekaan Filipina, kelompok ini mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang cukup besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik Filipina. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik negara Filipina semenjak kemerdekaan pada tahun 1946, sebenarnya mempunyai akar historis yang panjang pada derajat kuat lemahnya organ sentral negara di hadapan kekuatan sosial, ekonomi dan politik kelompok-kelompok elite ini. 37)

Kemerdekaan Filipina yang membangkitkan antusiasme rakyat akan terjadinya sebuah Zaman Baru dengan karakteristik penekanan pada perbaikan nasib "rakyat kecil" disertai tekad pelaksanaan kepemimpinan yang berwibawa, pemberantasan korupsi, serta program besar-besaran di sektor sosial-ekonomi, ternyata tidak kunjung tiba. Situasi sosial, ekonomi dan politik negara Filipina, terutama bagi kehidupan "rakyat kecil", ternyata tidak lebih baik dibandingkan ketika Filipina mengalami proses kolonisasi dan imperialisme. Golongan elite pemilik tanah yang mempunyai kekuasaan cukup besar secara politis dan ekonomis, tetap menjadi

37) Herry Priyono, "1989, Tahun Persimpangan Masa Depan Filipina," Kompas, tanggal 22 Februari 1989.

"tuan besar" di negara sendiri. Golongan yang masuk dalam populasi ini juga menguasai sektor manufaktur nasional, mengontrol sebagian besar kekayaan negara dan menanamkan modalnya yang besar pada sektor non produktif di luar negeri. Selain itu mereka juga mendapat banyak keuntungan ekonomis dari usaha eksploitasi para petani penyewa tanah dan buruh pedesaan yang bekerja di wilayah pertanian. Sehingga secara ekonomis mereka merupakan kekuatan yang sulit tergoyahkan.

Dalam bidang politik, partisipasi politik nyata selama masa pemerintahan Republik Filipina, sebenarnya hanya semacam demokrasi elite dari kelompok-kelompok tersebut dan mengabaikan tingkat partisipasi politik rakyat biasa. Hanya mereka yang kaya, yang dapat menjalani karier dalam bidang politik, khususnya untuk strata tingkat nasional. Karena untuk memperoleh kedudukan-kedudukan vital dalam struktur politik nasional, khususnya kursi untuk Kongres dan jabatan presiden, seorang calon harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk proses kampanye. Pemerintahan Filipina yang telah berupaya memberlakukan institusi politik demokratis dalam latar belakang sosial bukan egalitarian, ternyata memberikan dampak buruk bagi proses stabilitas politik dalam negeri. Karena dalam kenyataannya di lapangan, politisi-politisi Filipina yang sebagian besar berasal dari golongan elit cenderung

untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik golongannya. Kepentingan rakyat banyak cenderung menjadi prioritas terakhir program-program politik mereka.

Sampai dekade 1960-an situasi sosial, ekonomi dan politik negara Filipina tidak mengalami perubahan yang cukup berarti apabila dibandingkan dengan kemajuan-kemajuan negara-negara sedang berkembang lainnya di Asia yang memperoleh kemerdekaan hampir bersamaan waktunya atau bahkan lebih lambat dari Filipina. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada dekade ini, pemerintah Filipina menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam bidang ekonomi dan politik.

Kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Filipina pada awal dasawarsa tahun 1960-an yang menempuh jalur ke arah campur tangan yang lebih luas dalam sektor ekonomi nasional pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis di bidang ekonomi. Karena dikendalikan oleh berbagai peraturan dan ketetapan dari pemerintah, maka pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional menjadi tidak normal. Dalam banyak kasus, campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam sektor ekonomi, menyebabkan perekonomian Filipina pada era tahun 1960-an mengalami kemunduran-kemunduran. Banyaknya berbagai pungutan resmi dari pihak pemerintah dalam prosedur ekspor menunjukkan dampak yang sangat merugikan kegia-

tan-kegiatan yang berorientasi pada ekspor. Pemberian hak-hak istimewa dalam hal fiskal oleh pemerintah kepada industri-industri dasar dan penting sedikit banyak mengakibatkan pendapatan pemerintah dari pajak semakin menurun. Selain itu birokrasi pemerintah yang mengistimewakan pihak-pihak tertentu dalam memperoleh kredit bank cenderung merugikan dan menimbulkan kecemburuan di kalangan deposan serta kalangan industri kecil. Lambat laun cacat-cacat ini menjadi bertambah dalam dan semakin kentara. Karena tidak bisa memperoleh sumber daya dari sistem keuangan dalam negeri yang mengalami penekanan, pemerintah lantas semakin mengandalkan diri pada pendanaan dari luar. Karena tidak mampu dan juga tidak mau menarik investasi asing, pemerintah menjadi semakin banyak bergantung pada pinjaman luar negeri. Perkembangan tersebut menyiapkan landasan finansial dari krisis ekonomi di era tahun 1960-an, yang dipercepat timbulnya oleh kejadian-kejadian di luar bidang ekonomi dan keuangan. 38)

Dalam bidang politik, situasi Filipina pada dekade tahun 1960-an juga tidak berubah. Sistem politik feodal yang cenderung mengabaikan kepentingan dan hak-hak politik rakyat kecil tetap menjadi sebuah tradisi yang mendarah daging dalam sistem politik

38) Bresnan, hal. 277

Filipina. Land reform yang dinyatakan sebagai dasar pijakan "masyarakat baru," dan menjadi bagian penting dari program pembaharuan, juga tetap menjadi janji kosong penguasa. Selain itu timbulnya gelombang gerakan nasionalisme pada era tahun 1960-an yang menentang kehadiran Amerika Serikat dan dua pangkalan militernya semakin menjurus pada usaha-usaha radikal melawan pemerintah menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah Filipina.

Mengomentari situasi tahun 1960-an, Renato Constantino, seorang tokoh nasionalis Filipina, menggambarkan pandangannya mengenai kondisi Filipina sebagai berikut. Situasi politik Filipina mulai mendekati krisis. Pemerintah Filipina pada dua dasarwarsa pertama sejak kemerdekaan Filipina, telah membentuk sebuah masyarakat "tanpa tujuan umum, yang warganya terobsesi dengan tuntutan kemalasan." Pemerintah telah gagal mengatasi penjajahan masa lalu dan membuat Amerika Serikat mengontrol negara Filipina. Perekonomian dalam negeri semakin merosot. Pembaharuan tanah hanya merupakan sebuah mitos dan perusahaan-perusahaan asing terus mencari surplus modal. Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, dan kekhawatiran akan terjadinya pertentangan antar golongan semakin nampak. 39)

39) Ibid, hal. 91

Duta besar Amerika Serikat untuk Filipina dari tahun 1964 sampai tahun 1967, William Mc Cormick Blair, Jr. juga melukiskan situasi dalam negeri Filipina pada era tahun 1960-an sebagai berikut. Kondisi umum Filipina pada masa ini yang dilanda berbagai permasalahan politik, egoisme dan ketamakan golongan tertentu dalam masyarakat Filipina, maupun salah urus dalam pemerintahan dan penyuapan yang serius dari pihak pejabat pemerintah yang dalam beberapa kasus mencapai tingkat sogok-menyogok serta korupsi yang menyolok telah menyebabkan ketidakpuasan sebagian besar rakyat atas kewibawaan pemerintah. 40)

Kondisi sosial, ekonomi dan politik Filipina, semenjak kemerdekaan sampai dekade tahun 1960-an yang tidak menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, bahkan mendorong semakin terabaikannya kepentingan rakyat kecil, menyebabkan tanda-tanda kebangkitan gerakan komunis mulai nampak kembali. Generasi muda Marxis yang pada dekade tahun 1960-an mulai didominasi oleh kepemimpinan kalangan menengah terpelajar semakin meyakini bahwa sebuah revolusi Marxis akan mengakhiri situasi represif di Filipina dan akan mewujudkan sebuah struktur masyarakat yang lebih egaliter. Kalangan menengah terpelajar berhaluan komunis yang sebagian besar berpikiran moderen dan

40) Bonner, hal. 38

progresif ini, mulai memikirkan suatu revitalisasi perlawanan golongan komunis di bawah kepemimpinan sebuah partai yang mempunyai pola perjuangan yang lebih berkonsepsi. Obsesi mereka untuk melancarkan suatu revolusi Marxis di Filipina, mulai mereka wujudkan dengan mengambil langkah pertama mendirikan sebuah partai komunis baru yang mempunyai corak dan pola perjuangan yang berbeda dengan partai komunis sebelumnya. Maka pada tahun 1968 dibentuklah oleh mereka Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*).

2. Pengaruh Amerika Serikat yang cukup besar dalam penentuan Kebijakanaksanaan Pemerintah Filipina dan Keberadaan Dua pangkalan Militer Amerika di Filipina.

Tidak dapat disangkal, sejak Filipina memperoleh kemerdekaannya dari Amerika Serikat, dalam hubungan ekonomi dan politik bilateral, kebijakanaksanaan pemerintah Filipina cenderung dipengaruhi oleh negara adidaya ini. Tentu masalah hubungan Filipina - Amerika Serikat jauh lebih rumit dan punya sejarah yang ruwet ketimbang perumusan yang simplistis. Selain itu ada anggapan atau kesan seolah-olah Filipina adalah koloni Amerika Serikat dalam hal politik, ekonomi dan kultur.

Satu masalah yang paling sensitif dalam hubungan Filipina - Amerika Serikat terutama adalah soal dua pangkalan militer Amerika Serikat di Subic dan Clark.

Kehadiran dua pangkalan Amerika Serikat di Filipina tersebut pada dasarnya merupakan produk dan perjanjian antara Amerika Serikat - Filipina yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1947. Dalam perjanjian tersebut diputuskan bahwa Amerika memperoleh hak untuk mempunyai pangkalan militer di Subic dan Clark selama kurun waktu 99 tahun. Selain itu dalam suatu perjanjian terpisah, yaitu Perjanjian Bantuan Militer tahun 1947, menetapkan pengiriman suatu tim penasihat militer Amerika Serikat ke Filipina, disamping pengadaan peralatan bernilai sekitar \$ 20 juta bagi Angkatan Bersenjata Filipina. 41)

Bagi Amerika, keberadaan dua pangkalannya di Filipina merupakan suatu hal yang sangat vital untuk menunjang kebijaksanaan militer dan politik luar negerinya di kawasan Asia dan Pasifik. Dalam era Perang Dingin kedua pangkalan tersebut memungkinkan angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat memproyeksikan kekuatannya ke kawasan Pasifik Barat dan Samudera Hindia untuk membendung pengaruh Uni Soviet dan mempertahankan keseimbangan kekuatan serta memelihara perdamaian di kawasan tersebut. Karena keberadaan kedua pangkalan tersebut memberi kontribusi cukup besar bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, maka para politisi Amerika Serikat selalu berusaha

41) Bresnan, hal. 305

menciptakan suatu iklim politik sedemikian rupa di Filipina yang secara kondusif bisa memberi "keamanan" bagi kedua pangkalannya di Subic dan Clark. Oleh sebab itu dalam konteks ini, pemerintah Amerika Serikat selalu berupaya mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa di Filipina dan melakukan manuver-manuver dalam bidang politik dan ekonomi di Filipina untuk menunjang politik luar negerinya dan mempertahankan kehadiran kedua pangkalannya di kawasan tersebut. Sebagai ilustrasi dari kondisi tersebut, dapat kita lihat pada situasi Filipina di era tahun 1960-an.

Ketika Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet "sedikit memanaskan" di kawasan Amerika Latin dan Asia Tenggara pada era tahun 1960-an, serta mengalami klimaksnya dengan terjadinya Perang Vietnam, sedikit banyak situasi dalam negeri Filipina terpengaruh atas peristiwa ini. Amerika Serikat yang berupaya untuk memenangkan perangnya di Vietnam secara terang-terangan berupaya mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah Filipina untuk memberi dukungan politik dan militer kepada angkatan bersenjata Amerika Serikat di Vietnam.

Untuk maksud tersebut secara terang-terangan Presiden Amerika Serikat saat itu, Lyndon B. Johnson mengirimkan utusan-utusan khusus untuk meyakinkan pemerintahan Filipina guna mengirimkan angkatan perang

Filipina ke Vietnam. Pada masa itu pemerintah Filipina dipimpin Ferdinand E. Marcos yang sedang memasuki masa jabatannya yang pertama sebagai presiden Filipina (1965-1969). Akhirnya pemerintahan Marcos memang menyanggupi permintaan pemerintahan Amerika Serikat ini, walaupun mereka hanya bersedia mengirimkan batalyon zeni sejumlah 2000 orang ke Tay Ninh, Vietnam Utara. 42)

Usaha pemerintahan Amerika Serikat untuk melibatkan Filipina secara langsung dalam perang Vietnam, secara tak terduga menimbulkan gelombang protes di seluruh Filipina. Kaum politisi dan mahasiswa nasionalis Filipina melakukan gelombang demonstrasi untuk menentang intervensi dan pengaruh Amerika Serikat yang semakin besar di Filipina. Terlebih lagi golongan komunis yang pada waktu itu berjuang di bawah tanah dan mulai memasukkan anggota-anggota baru dari kalangan menengah terpelajar, memandang pengaruh Amerika Serikat dalam politik dalam negeri Filipina sebagai pelanggaran atas kedaulatan Filipina dan merendahkan martabat Bangsa Filipina. Mereka juga mulai menyadari bahwa campur tangan Amerika Serikat dalam politik dalam negeri Filipina serta keberadaan pangkalan Amerika Serikat di Subic dan Clark sedikit banyak akan membahayakan eksistensi

42) Bonner, hal. 67-68

gerakan komunis di kawasan Asteng pada umumnya dan Filipina pada khususnya.

Usaha sungguh-sungguh Amerika Serikat untuk membendung komunisme di kawasan Asteng seperti yang ditunjukkan Amerika Serikat di Vietnam semakin menyadarkan kaum komunis Filipina bahwa keberadaan militer Amerika Serikat di Filipina nantinya akan menjadi penghalang utama cita-cita mereka. Dalam konteks ini, generasi muda penganut Marxis di Filipina, yang pada era tahun 1960-an mulai didominasi oleh golongan menengah terpelajar dan berpikiran moderen, mulai memikirkan suatu pola dan strategi perjuangan baru yang lebih berkonsepsi dan terarah untuk menumbangkan pemerintahan Filipina dan hegemoni Amerika Serikat. Untuk maksud tersebut, pada tahun 1968, generasi muda penganut Marxis di Filipina yang berpikiran progresif mendirikan sebuah partai komunis baru yang mempunyai corak dan pola perjuangan yang cukup berbeda dengan partai komunis sebelumnya. Maka dibentuklah CPP (*Communist Party of Philippines*).

3. Kegagalan perjuangan PKP dan munculnya generasi muda Marxis yang berpikiran maju dan modern.

Kegagalan perjuangan PKP yang pernah mempunyai peranan cukup besar dalam politik kiri Filipina dengan ditandai kehancuran kekuatan inti mereka pada era tahun 1950-an, telah menjadikan peristiwa ini sebagai

pelajaran berharga bagi generasi penganut Marxis selanjutnya. Faktor utama kegagalan perjuangan PKP ini terutama disebabkan sifat gerakannya yang konservatif dan terlalu dogmatis, tidak memperhatikan kondisi dan situasi konkret di Filipina. Dalam konteks ini, generasi muda Marxis di Pilipina yang pada era tahun 1980-an mulai memasukkan banyak anggota baru dari kalangan menengah terpelajar, mulai memikirkan suatu revitalisasi partai komunis baru yang mempunyai strategi dan pedoman perjuangan yang lebih berkonsepsi. Pelajaran-pelajaran berharga yang mereka peroleh dari kegagalan perjuangan PKP memotivasi mereka untuk menerapkan suatu pola perjuangan baru yang berimplikasi pada keberhasilan proses revolusi. Di bawah kepemimpinan Jose Maria Sison generasi muda Marxis yang berpikiran moderen dan progresif mulai melaksanakan langkah-langkah perjuangan baru. Dan langkah-langkah tersebut diawali dengan membentuk sebuah partai komunis baru di Filipina pada tahun 1968, yaitu Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*).

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

PARTAI KOMUNIS FILIPINA (CPP)

A. Struktur Organisasi dan Sumber Dana Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*)

Dibawah pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos (1965-1986) kelihatannya tidak begitu besar kemungkinan bagi pemerintah untuk dapat menahan pertumbuhan Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*). Gerakan komunis tetap menjadi ancaman nyata yang tidak dapat dipandang ringan. Berbeda dengan situasi pada tahun 1950-an, militer Filipina kini tidak lagi menghadapi pemberontakan yang terdiri dari kaum petani di lokasi yang terbatas pada suatu dataran berpenduduk padat, dimana mereka dapat dilindas dengan pergerakan pasukan-pasukan pemerintah secara terpadu. Tetapi yang dihadapi kini adalah sejumlah besar satuan gerilya yang beroperasi dengan gerakan sangat lincah di daerah pegunungan dan hutan yang medannya sulit ditembus, di-tengah kaum penduduk yang bersimpati atau mungkin juga gentar.

Sejak dibentuknya pada tahun 1968 dalam konferensi di Pengasinan, Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*) telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sampai pertengahan tahun 1980-an. Keanggotaan inti CPP sudah mencapai angka 30.000 orang, yang terbagi

dalam 75 kesatuan. Selain itu sayap militernya, NPA (New People Army) yang dibentuk pada tahun 1969 dengan kekuatan awal hanya 35 orang, pada pertengahan tahun 1980-an kekuatannya sudah mencapai 20.000 anggota gerilya full time dan part time, serta memiliki 12.000 senapan modern. Front-front gerilya paling akhir sudah tersebar di sekitar 60 dari 73 propinsi di Filipina, dengan basis massa yang sangat aktif mendukung. Sedangkan keseluruhan anggota partai dan simpatisannya bisa berjumlah sekitar satu juta lebih. Pada pertengahan tahun 1980-an dengan penuh keyakinan para pimpinan partai mengklaim, bahwa sekitar 25 persen dari warga barangay (desa) sudah dikontrol atau digerakkan oleh NPA dan beberapa organ partai. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, mereka juga menegaskan bahwa dalam tiga sampai lima tahun lagi, tahap perjuangan akan mencapai suatu fase perang saudara berskala besar (*full scale civil war*). Peringatan pemerintah Amerika juga sudah menunjukkan kesimpulan-kesimpulan seperti yang diutarakan para pemimpin CPP tersebut. Richard L. Armitage, asisten sekretaris pada Dinas Pertahanan Amerika Serikat untuk Tugas-tugas Keamanan Internasional pada tahun 1984 menekankan, "Kendatipun kekuatan tempur dari NPA sangat kurang dalam jumlah personel dan persenjataan dari angkatan bersenjata Filipina, pemberontakan-pemberontakan yang mereka gelar merupakan wujud dari konsolidasi basis kekuatan mereka yang sekali waktu akan dapat merobohkan keseimbangan

kekuatan militer pemerintah dalam beberapa tahun berikutnya. ⁴³⁾ Pernyataan Armitage tersebut juga didukung oleh laksamana William J. Crowe (seorang komandan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik) yang berkunjung ke Filipina pada bulan Maret 1984. Beliau mengatakan bahwa NPA mempunyai kekuatan militer cukup kuat dan akan menjadi ancaman yang serius bagi keutuhan regim Marcos. Dalam waktu sekurang-kurangnya lima belas tahun, NPA akan dapat merobohkan kekuatan militer pemerintah. ⁴⁴⁾ Pada tahun 1985, kepala Angkatan Bersenjata Filipina, Letjen Fidel Ramos juga menekankan bahwa lima belas orang yang dibunuh setiap hari sebagai akibat dari "kejahatan NPA". Lebih jelas lagi Ramos berkata, 70 persen kejadian-kejadian berdarah di Filipina dipicu oleh NPA. Kaum komunis hampir tidak dapat dilawan, karena mereka menggunakan taktik yang cukup menakutkan dan efektif, yaitu menyerang lalu menghindar. ⁴⁵⁾ Secara lebih rinci untuk mengetahui perkiraan perkembangan kekuatan dan pengaruh NPA di Filipina antara tahun 1972-1988, dapat dilihat pada lampiran I.

⁴³⁾ Chapman, hal 110-111

⁴⁴⁾ Lewis M. Simons, Worth Dying For, William Morrow and Company Inc., New York, 1987, hal. 105-106

⁴⁵⁾ Ibid, hal. 101

Pertumbuhan kekuatan dan pengaruh CPP yang terus meningkat tersebut, telah menguatkan asumsi bahwa partai tersebut mempunyai struktur organisasi yang cukup kuat, efektif dan efisien. CPP telah melembagakan kekuatan dan pemusatan komando untuk semua perencanaan, demi melancarkan sistem koordinasi seluruh organ partai dan untuk membagi sumber-sumber kekuatan dan keanggotaan untuk membangun kekuatan politik dan militer. Fungsi organisasi partai menyerupai pembagian kerja pada sebuah pabrik yang setiap unit akan selalu dinilai soal efektif tidaknya pada tujuan-tujuan politik maupun militer. Koordinasi partai dikendalikan oleh hubungan ketergantungan dengan keseluruhan organ organisasi yang mengatur seluruh strategi partai. Karena organisasi partai ini bersifat desentralistis, maka CPP menjalankan sistem komando dan kontrol yang ketat dan bijaksana di dalam wilayah operasi dan intra regional (antar daerah). 46)

Dalam struktur organisasi CPP, Komite Sentral (*Central Committee*) menduduki posisi yang paling tinggi. Dalam tubuh Komite Sentral terdapat dua badan penting yang menjadi inti Komite Sentral, yaitu Biro Politik (*Politbiro*) dan Komite Eksekutif (*Executive Committee*). Politbiro beranggotakan 15 orang dan berfungsi mengarahkan aktifitas partai secara keseluruhan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan Komite Eksekutif

46) Kessler, hal. 76

terdiri dari ketua umum CPP, sekretaris jendral CPP dan ketua NDF. Komite Eksekutif mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting, dalam kejadian dimana Komite Sentral tidak dapat mengambil suatu keputusan berkaitan dengan permasalahan tertentu. Seluruh anggota Komite Sentral dipilih dalam kongres nasional anggota partai yang diadakan tiap 5 tahun sekali: "Komite Sentral bertanggung jawab atas kepemimpinan sentral, ideologis, dan politik; bertanggung jawab terhadap usaha pengkonsentrasian sumber daya perjuangan dan personel di tempat-tempat paling strategis di seluruh negara; bertanggung jawab untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan revolusi di tingkat regional sampai lokal; dan bertanggung jawab pada pengawasan dan kontrol terpadu terhadap perkembangan perjuangan partai secara keseluruhan. 47)

Di bawah Komite Sentral terhadap tiga badan utama, yaitu :

1. NDF (*National Democratic Front*)

Sebagai sayap politik CPP, NDF bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan oleh Komite Sentral. Selain itu, sebagai organisasi induk dari front nasional yang dibentuk oleh CPP, NDF, bertanggungjawab untuk membangun, mengkonsolidasikan dan mengontrol aktifitas-

47) Ibid., hal. 64

aktifitas politik front nasional dan berbagai organisasi massa yang berafiliasi dengan NDF. Di bawah NDF terdapat sejumlah Front Kesatuan Regional (*Regional United Front*) yang bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan, pengkoordinasian dan pengawasan aktifitas-aktifitas politik front nasional di tingkat regional. Kemudian masing-masing Front Kesatuan Regional membawahi sejumlah Komite Kota (*Urban Committee*) yang bertanggungjawab menangani usaha pembangunan, pengkoordinasian dan pengawasan aktifitas-aktifitas politik front nasional di wilayah-wilayah perkotaan.

2. Komisi Teritorial (*Territorial Commission*). Dalam organisasi CPP terdapat 6 Komisi Teritorial untuk wilayah Luzon Utara, Luzon Selatan, Luzon Tengah, Visayas, Negros dan Mindanao. Masing-masing Komisi Teritorial bertanggung jawab atas pelaksanaan segala aktifitas partai, perencanaan strategi partai dan pengawasan front perjuangan di wilayah yang menjadi wewenangnya. Masing-masing Komisi Teritorial membawahi sejumlah Komite Partai (*Party Committee*) yang disusun secara hierarkis dari tingkat regional sampai tingkat lokal (*barangay*). Masing-masing Komite Partai bertanggungjawab atas pelaksanaan aktifitas partai, perencanaan strategi partai dan pengawasan front perjuangan di wilayah yang menjadi wewenangnya. Selain itu, masing-masing Komite Partai mempunyai badan eksekutif yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam

bidang eksekutif. Masing-masing Komite Teritorial juga membawahi sejumlah Komando Operasional NPA (*NPA Operational Command*) yang juga disusun secara hierarkis dari tingkat regional sampai ke tingkat lokal (*barangay*). Masing-masing Komando Operasional NPA bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi-aksi gerilya di wilayah yang menjadi wewenangnya. Aksi-aksi gerilya di wilayah pedesaan dan pedalaman dikoordinasikan terutama oleh *Main Regional Guerrilla Unit* dan *Secondary Regional Guerrilla Unit*. Sedangkan aksi-aksi gerilya di wilayah perkotaan dikoordinasikan oleh *Armed Urban Partisan Unit* dan *Sparrow Unit*.

3. Komisi Fungsional (*Functional Commission*). Terdiri dari 4 bagian yaitu, Komisi Fungsional untuk Pergerakan Massa (*Functional Commission for Massa Movement*) yang bertanggung jawab atas infiltrasi pelajar, pemuda, buruh dan kelompok petani; Komisi Fungsional untuk Propaganda (*Functional Commission for Propaganda*) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan propaganda-propaganda politik untuk kepentingan partai; Komisi Fungsional untuk Persatuan Front (*Functional Commission for United Front*) yang bertanggung jawab mengawasi NDF; dan Komisi Fungsional untuk Urusan Militer (*Functional Commission for Military*) bertanggung jawab mengawasi NPA. 48)

48) Ibid., hal 64-66



Struktur organisasi CPP yang ditunjukkan pada lampiran II menggambarkan bagaimana Komite Sentral mempertahankan pengawasan atas NDF dan NPA sampai ke tingkat lokal dan memperjelas bahwa NDF dan NPA ditempatkan dalam struktur organisasi yang paralel. Struktur organisasi CPP yang bersifat desentralistis juga memberikan keleluasaan cukup besar kepada para pimpinan cabang partai untuk menafsirkan kebijaksanaan Komite Sentral, untuk disesuaikan dengan kondisi medan yang mereka hadapi. Manifestasi desentralisasi lainnya adalah munculnya berbagai surat kabar daerah yang dikelola oleh sejumlah Komite Partai di wilayah-wilayah yang menjadi wewenang mereka. Surat-surat kabar itu antara lain, *Himagsik* di Luzon, *Silyab* di Bicol, *Daba-daba* di Panay dan *Paghimakas* di Negros.

Berdasar konstitusi partai, semula sumber dana organisasi CPP didasarkan pada bantuan luar negeri dan iuran setiap anggota partai. Iuran dikumpulkan sebesar 50 sen dalam sebulan, kemudian ditambah dengan sejumlah bantuan dana dari Komite Sentral yang didapat dari bantuan luar negeri. Setiap kegiatan front dan komite partai sudah dihitung dalam anggaran tahunan, dan CPP bertanggung jawab mengontrol setiap pelaksanaan aktifitas partai di tingkat regional sampai lokal melalui suatu rancangan anggaran yang sudah ditargetkan, entah demi tujuan politik maupun militer. 49)

49) Ibid, hal. 74

Ketika Republik Rakyat Cina tidak memberi bantuan dana lagi sekitar pertengahan tahun 1970-an, sejak itu CPP mulai menerapkan suatu "kebijaksanaan finansial yang nekad". Penetapan program baru bahwa keseluruhan biaya finansial ditanggung sendiri, mengakibatkan terjadinya pemungutan pajak yang berlebihan di daerah-daerah yang dikontrol NPA dan pemerasan yang kompleks terhadap usaha-usaha bisnis di Filipina. Pengelompokan pajak terdiri dari 2 tipe, yaitu pajak perorangan dan pajak bisnis. pajak perorangan dibebankan pada orang/keluarga yang tinggal di wilayah yang dikuasai NPA. Mereka diharuskan membayarkan pajak mingguan secara tetap, dapat berupa uang maupun beras. Sedangkan pajak bisnis dibebankan pada usaha-usaha bisnis maupun perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah-wilayah yang dikontrol NPA. Pajak bisnis dibayarkan tiap bulan sekali. Penetapan pajak ditentukan dalam suatu negosiasi antara organ CPP dengan pihak perusahaan yang bersangkutan. Situasi finansial organisasi CPP pada pertengahan tahun 1970-an ini, mungkin merupakan penyebab terjadinya peralihan fokus perhatian Komite Sentral untuk memberikan otonomi seluas-luasnya pada komite-komite partai untuk menanggulangi masalah-masalah finansialnya. 50)

50) Ibid, hal.75

B. NDF (*National Democratic Front*) dan NPA (*New People Army*)

Dalam struktur organisasi CPP, NPA dan NDF mempunyai peranan cukup vital. NPA dan NDF, yang masing-masing berfungsi sebagai sayap militer dan sayap politik CPP, merupakan "ujung tombak" kekuatan militer dan politik CPP. Sebagai organ partai yang berfungsi untuk mengakumulasi kekuatan revolusioner dalam bidang militer dan politik, NPA dan NDF mempunyai tanggung jawab besar dalam proses perjuangan partai. Untuk mengetahui seluk beluk dua organ penting CPP ini, ada baiknya kita mengenalnya lebih lanjut.

1. NPA (*New People Army*)

NPA didirikan pada tanggal 29 Maret 1969 di Propinsi Tarlac, Luzon Tengah. NPA didirikan atas prakarsa Jose Maria Sison dan Dante. Menurut pandangan mereka, keberadaan suatu unit pasukan bersenjata yang mobil akan mendorong kemajuan perjuangan partai dalam bidang politik. Konferensi di Propinsi Tarlac ini juga menelorkan suatu pernyataan yang didalamnya menggambarkan tujuan-tujuan dan sasaran NPA. Dalam pernyataan tersebut diuraikan : 51)

"Strategi utama yang paling dasariah dari New People Army adalah suatu perjuangan rakyat secara meluas dan perlahan-lahan, dengan membangun unit-unit pasukan diluar kota yang terus-menerus tumbuh menjadi lebih

51) Leonard Davis, Revolutionary Struggle in the Philippines, St. Martin's Press, New York, 1989, hal. 48

kuat sebagai basis pertahanan para pejuang, revolusi pertanian dan pembangunan yang mulai dari basis desa, serta konsisten mengepung kota sampai akhirnya kekuatan musuh dikuras tenaganya karena ditaklukkan sedikit demi sedikit dari daerah luar kota. NPA berjuang untuk membangun basis-basis pedesaan, memperkuat organisasi-organisasi lokal dari pemerintahan rakyat yang meningkat tahap demi tahap sampai organisasi tersebut dapat secara efektif menghancurkan kekuatan musuh yang masih bertahan dan berkonsentrasi di kota-kota dan kamp-kamp militer. Pemikiran ini merupakan strategi yang sistematis dan terpilih dari zona-zona gerilya untuk mencapai tahap stabilitas daerah basis dimana pemerintahan rakyat lokal dapat beroperasi secara penuh. Basis-basis pedesaan akan berfungsi sebagai fondasi untuk keadaan darurat dan ekspansi dari zone-zone gerilya serta untuk meningkatkan semua kekuatan lainnya dari revolusi demokrasi rakyat."

Semula kekuatan awal NPA hanya 35 orang bersenjata. Tetapi berkat kegigihan kepemimpinan Dante (pemimpin tertinggi pertama NPA) dan situasi represif yang melanda Filipina pada awal tahun 1970-an, NPA mulai banyak mendapatkan pengikut dan mengalami kemajuan-kemajuan cukup berarti. Berdirinya NPA pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah Filipina, karena itu operasi-operasi pemberantasan terus dilakukan oleh kekuatan gabungan angkatan bersenjata Filipina.

Sampai pertengahan tahun 1980-an, keadaan front-front gerilya NPA sudah dibangun di hampir semua propinsi dengan basis massa (terdiri kaum petani, pekerja perkebunan, nelayan, dan anggota-anggota suku minoritas) yang memberikan dukungan aktif kepada perjuangan revolusi bersenjata.

Kedisiplinan merupakan suatu hal mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota NPA. Setiap anggota NPA harus mentaati "Tiga Disiplin Utama" dan "Delapan Pedoman Arah" dari doktrin Mao Zedong seperti yang tertuang dalam Buku Merah (*Little Red Book*). Pertama, "Tiga Disiplin Utama" (*Three Main Rules of Discipline*) adalah :

1. Mentaati aturan-aturan dalam seluruh karya.
2. Jangan mengambil sebatang jarum maupun selembat benangpun dari masyarakat.
3. Menghindari setiap usaha provokasi dari pihak musuh.

Kedua, "Delapan Pedoman Arah" (*Eight Points of Attention*) yang harus diperhatikan para anggota adalah :

- a. Berbicaralah jujur.
- b. Bayarlah segala sesuatu sesuai harga yang telah ditentukan.
- c. Kembalikan segala sesuatu yang dipinjam.
- d. Gantilah apa saja yang telah anda rusakkan.
- e. Jangan menyakiti maupun membunuh rakyat.
- f. Jangan merusakkan panen.
- g. Jangan bertindak sewenang-wenang terhadap wanita.
- h. Jangan menganiaya para tawanan. 52)

Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan

52) Lanchica, hal 167-168

organisasi lainnya, maka mereka wajib berhadapan dengan pengadilan militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, seperti teguran, penurunan pangkat, pengeluaran dan eksekusi. ⁵³⁾ Setiap anggota baru yang masuk NPA harus menjalani pelatihan dasar militer sebelum dikirim untuk masuk dalam sebuah unit pasukan. Suatu laporan pada tahun 1970 mengatakan bahwa NPA mempunyai sistematisasi dalam pelatihan militer bagi para personelnnya. Pelatihan militer didasarkan atas kurikulum pendidikan mengenai taktik dan teknik militer. ⁵⁴⁾ Secara hierarkis militer, pembagian unit pasukan NPA mempunyai kesamaan dengan pasukan Huk. Keseluruhan kekuatan militer NPA dibagi dalam sejumlah batalyon. Setiap batalyon terbagi dalam beberapa kompi. Masing-masing kompi terdiri dari tiga sampai empat peleton. Dalam satu peleton terdapat tiga sampai empat regu yang masing-masing berkekuatan sembilan sampai tiga belas serdadu.

2. NDF (*National Democratic Front*)

Pada tanggal 24 April 1973 NDF secara resmi didirikan. Pada waktu didirikan NDF mempunyai anggota sejumlah organisasi massa, sebagai berikut : Asosiasi

⁵³⁾ Kessler, hal. 74

⁵⁴⁾ Ibid, hal. 73

Petani Revolusioner (*Revolutionary Peasant Association*), Pemuda Nasionalis (*Nationalist Youth*), Liga Mahasiswa Filipina (*League of Filipino Students*), Perkumpulan Pemuda untuk Nasionalisme dan Demokrasi (*Youth for Nationalism and Democracy*), Asosiasi Patriot Kesehatan (*Patriotic Health Association*), dan Asosiasi Guru Nasionalis (*Association of Nationalist Teachers*). Sepuluh pokok manifestonya menuding "imperialisme Amerika Serikat" sebagai dalang kebobrokan dan kediktatoran Marcos yang fasis :

- a. Mempersatukan semua golongan yang anti imperialis dan kekuatan demokratis untuk menggulingkan Amerika Serikat dan kediktatoran Marcos, serta berjuang untuk memperkuat suatu pemerintahan koalisi yang berbasis pada sistem demokrasi yang benar dan representatif.
- b. Mengusir dan melawan imperialisme Amerika Serikat sebagai dalang yang memperkuat kediktatoran yang fasis, berjuang untuk mengusir semua golongan yang mendukung kekuatan imperialis tersebut, dan menasionalisasikan semua kekayaannya di seluruh negeri.
- c. Berjuang untuk menegakkan kembali semua hak demokrasi bagi seluruh rakyat, seperti kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, berkeyakinan religius dan hak persamaan hukum.

- d. Mengumpulkan semua kekuatan politis untuk memberikan sumbangan material demi mendukung revolusi bersenjata dan perjuangan bawah tanah melawan kediktatoran Amerika Serikat-Marcos.
- e. Mendukung program land reform yang sungguh-sungguh yang dapat membebaskan petani dari pengisapan golongan feodal dan semi feodal, serta meningkatkan produksi pertanian melalui koperasi.
- f. Meningkatkan mata pencaharian masyarakat, menjamin hak untuk upah yang layak atas kerja, dan memproteksi kekayaan nasional untuk melawan monopoli pemilik modal asing.
- g. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional, serta memberantas budaya imperialistik, feodal dan fasis.
- h. Membantu kaum minoritas nasional, khususnya mereka yang berada di Mindanao dan propinsi-propinsi di wilayah pegunungan dalam perjuangannya untuk menentukan nasib sendiri.
- i. Menghukum, setelah pemeriksaan pengadilan, para pejabat yang berada dalam lingkaran kelompok fasis Marcos karena kejahatannya melawan rakyat dan mengambil alih semua kekayaannya yang diperoleh secara tak halal.
- j. Mempersatukan semua rakyat melawan imperialisme dan meminta bantuan mereka untuk mendukung perjuangan revolusi di Filipina. 55)

55) Ibid,. hal 80-81

Program umum dari NDF dinyatakan sebagai suatu program untuk kebebasan nasional. Program tersebut mendefinisikan suatu strategi untuk pembebasan rakyat Filipina dari dominasi pemerintahan asing, dominasi kaum feodal dan kontrak negara oleh kalangan tuan tanah tradisional. Program tersebut berusaha membebaskan diri dari kerangka kungkungan negara asing dengan suatu alternatif masyarakat yang berada di bawah pemerintahan nasional demokrasi. 56)

Pembentukan NDF merupakan bagian dari strategi CPP di bidang politik. Melalui kepemimpinan NDF, CPP berminat untuk membentuk sebuah front nasional yang mempersatukan berbagai organisasi massa yang mempunyai tujuan perjuangan searah dengan golongan sayap kiri, yaitu menggulingkan kediktatoran Amerika Serikat-Marcos dan membentuk sebuah masyarakat yang lebih egalitarian, dengan penekanan pada perbaikan hidup rakyat kecil. Melalui pembentukan sebuah front nasional yang didukung oleh sejumlah organisasi massa yang secara yuridis bersifat legal dan semi legal, diharapkan keabsahan perjuangan NDF lebih diakui oleh rakyat banyak. Hal ini secara politis akan menguntungkan sepak terjang NDF dalam mewujudkan tujuan-tujuan perjuangannya. Sebuah front nasional yang akan dibangun akan dapat mendukung perjuangan bersenjata dan

56) Davis, Revolutionary, hal. 66

tujuan revolusi demokrasi nasional. Perjuangan legal dari NDF pada dasarnya ditempuh melalui usaha protes massa (demokrasi), pemogokan, pemboikotan dan taktik-taktik sejenisnya.

Sebagai sayap politik dari CPP, maka NDF harus berjuang sebagai "kekuatan inti" (*force of the core*) agar menjadi petunjuk bagi organisasi maupun gerakan massa lainnya. Para kader NDF dilatih dengan sangat ketat dalam "kegiatan resmi harian" (*day to day legal work*). Pelatihan ini memberi manfaat cukup besar bagi para kader apabila mereka harus bertanggung jawab dalam urusan pada tingkat yang lebih besar dalam sebuah aksi massa. Para kader NDF terutama diterjunkan di sektor-sektor perkotaan untuk "memanipulasi" organisasi-organisasi massa di masyarakat agar dapat direkrut dalam front nasional. Mereka juga mengorganisasikan aksi-aksi massa untuk usaha-usaha demonstrasi, pemogokan dan pemboikotan. Berbeda dengan NPA, aksi-aksi NDF bersifat non militer. 57)

C. Keanggotaan Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*)

Karena luwesnya batasan ideologi yang diterapkan oleh CPP, maka tidaklah mengherankan banyak kalangan menengah intelektual dan sejumlah rohaniawan yang ter-

57) Kessler, hal. 84

tarik pada perjuangan partai tersebut. Dari golongan rohaniawan yang paling terkenal adalah Pastor Conrado Balweg, yang kemudian menjadi pemimpin kelompok bersenjata NPA di Kalingan Apayao, Luzon Utara. Pastor lain yang cukup disegani adalah Frank Navarro yang beroperasi di wilayah Surigao del Sur, yang memimpin satuan bersenjata NPA yang cukup memusingkan tentara pemerintah. 58) Kedua pastor tersebut adalah contoh dari sejumlah pastor Katolik yang bergabung dengan CPP.

Mengenai keterlibatannya dalam perjuangan CPP, Balweg memberi alasan bahwa, "Gereja selalu mempertahankan prinsip memperjuangkan keadilan, dan Yesus sendiri telah menggunakan kekerasan untuk mengusir para pedagang yang ada di Kenisah. Gereja harus berdiri secara revolusioner melawan kejahatan moral, ketidakadilan yang tidak didasarkan pada ajaran Kristiani. 59)

Kedua pastor diatas adalah contoh dari para pastor yang meyakini doktrin-doktrin keagamaan untuk gerakan pembebasan atau *theology of liberation* yang banyak pula dianut oleh para pastor di Amerika Latin. Bagi yang meyakini doktrin ini, penghayatan iman kepercayaan Kristiani tak lepas dari tugas menciptakan keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, gereja diharuskan untuk mendekatkan diri kepada rakyat yang miskin dan tertindas.

58) Nadeak, hal 214-215

59) Chapman, hal. 88

Banyak pihak yakin, terutama Konferensi Wali Gereja Filipina, bahwa para pastor seperti Balweg adalah pihak yang bergabung dengan CPP bukan karena keyakinan komunis, melainkan karena meyakini doktrin teologi pembebasan. ⁶⁰⁾ Mengenai keterlibatan para pastor yang meyakini *theology of liberation* dalam gerakan komunis, baik itu di Amerika Latin maupun di Filipina, sebenarnya sangat ditentang oleh golongan Gereja Konservatif. Dalam sejumlah kasus, *theology of liberation* memang sering digunakan sebagai sarana untuk menghalalkan dilakukannya usaha-usaha yang menjurus pada kekerasan. Karena dikhawatirkan akan menodai citra baik Gereja, maka pada pertengahan tahun 1980-an pimpinan tertinggi Gereja Katolik di Vatikan secara resmi melarang penggunaan prinsip-prinsip *theology of liberation* untuk melegalkan aksi-aksi kekerasan.

Dalam organisasi formal CPP, sejumlah pastor yang bergabung ini tidak menduduki posisi-posisi penting organisasi. Karena predikat kepastorannya, mereka malah cenderung menjadi pemimpin spiritual dan pemimpin non formal satuan-satuan bersenjata NPA di wilayah-wilayah tertentu di Filipina.

Dari kalangan menengah intelektual, karena tidak adanya ikatan primordial, lebih banyak lagi yang bergabung dalam CPP. Dalam perkembangan selanjutnya, kalangan menengah intelektual ini menjadi tenaga-tenaga

⁶⁰⁾ Nadeak, hal. 215

inti atau *hard core* dalam aktifitas-aktifitas perjuangan partai. Dalam partai mereka banyak yang menduduki posisi-posisi vital, bahkan menjadi aktor-aktor penting yang menentukan program-program maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan partai secara menyeluruh. Kaum intelektual yang bergabung dengan CPP terutama berasal dari kalangan perguruan tinggi yang notabene merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cukup terkemuka. Seperti misalnya, Profesor Marion Surbona, Dr. Nemesio Prodent (dari *College of Commerce, Manila*), dan DR. Edgar Jopson (dari *Ateneo de Manila University*). Selain itu prestasi yang cukup menonjol dari CPP adalah keberhasilannya menarik ribuan mahasiswa bergabung dalam kubunya. Banyak pengamat menilai, corak perjuangan CPP yang progresif dan revolutioner mungkin telah mendorong kalangan menengah intelektual untuk menjatuhkan pilihannya pada kubu CPP, sebagai alat perjuangan untuk mengakhiri situasi regresif di Filipina. Walaupun banyak juga dari mereka yang bergabung karena persamaan ideologi.

Meskipun CPP mempunyai banyak anggota dari kalangan menengah intelektual dan sejumlah rohaniawan, tetapi seperti partai-partai komunis pada umumnya, struktur keanggotannya tetap didominasi oleh kalangan buruh dan tani. Mengingat bahwa perjuangan CPP memang diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, kalangan menengah intelektual yang menduduki posisi-posisi penting dalam organisasi partai, ternyata berhasil

menggalang kerja sama dan dukungan dari kaum buruh dan tani. Kemanunggalan golongan rohaniawan dan intelektual disatu pihak, dengan golongan tani dan buruh di pihak lain, dalam sebuah wadah perjuangan gerakan komunis merupakan gejala yang luar biasa dalam sejarah pergerakan komunis di Filipina.



BAB IV

STRATEGI-STRATEGI PERJUANGAN PARTAI KOMUNIS FILIPINA

(C P P)

DALAM MENGHADAPI KEKUATAN PEMERINTAHAN FILIPINA

A. Garis Besar Strategi Perjuangan CPP dalam Bidang
Militer dan Politik

Dalam usaha pemberontakannya, CPP secara garis besar menitikberatkan strategi perjuangannya dalam bidang militer dan politik. Secara konseptual, penerapan strategi perjuangan CPP didasarkan pada doktrin Mao Zedong mengenai "perang rakyat". Keberhasilan Cina, Kuba dan Vietnam melancarkan revolusi komunis dengan menerapkan prinsip-prinsip strategi ajaran Mao, secara tidak langsung telah memberikan inspirasi para pemimpin CPP untuk menerapkan pola dan strategi revolusi serupa.

Dalam bidang militer, strategi perang gerilya merupakan prinsip fundamental yang diangkat oleh CPP dalam perjuangannya. Ketidakseimbangan kekuatan militer pasukan komunis dengan tentara pemerintah, dipandang dari segi jumlah personel, persenjataan maupun tingkat profesionalitas, merupakan alasan utama CPP untuk menerapkan strategi tersebut. Selain itu kondisi geografis Filipina yang merupakan gugusan kepulauan dengan relief medan yang bergunung-gunung serta sejumlah hutan tropis yang masih cukup luas, juga menjadi unsur pendorong bagi pelaksanaan taktik perang gerilya tersebut.

Doktrin perang fase panjang (*long fight*) merupakan fokus utama dalam konsep strategi militer CPP. Sison dan sejumlah pimpinan CPP mengambil strategi Maoist tentang basis daerah stabil, atau zona-zona, dimana para gerilyawan dapat bersembunyi dengan aman. Dari zona-zona ini mereka dapat menyerang secara bergelombang, sambil memperkuat basis yang baru dalam setiap gelombang serangan. Perang akan berlangsung terus dalam tiga fase panjang yaitu: "strategi defensif", bila kekuatan NPA berkembang selama peperangan dan penyerangan hanya dalam skala kecil, menggerebek dan menyergap; "strategi mengunci", bila NPA memiliki keseimbangan kekuatan dan konfrontasi yang hampir sama dengan kekuatan musuh; dan "strategi menyerang", bila berkurangnya penjagaan kota dan kesediaan militer pemerintah, kemudian disusul serangan serentak dari seluruh front untuk sebuah target tunggal : kemenangan. ⁶¹⁾ Melalui strategi perang gerilya yang dilakukan dalam fase panjang, diharapkan kekuatan tentara komunis akan dapat menyebar ke berbagai front melalui pulau-pulau. Sehingga kekuatan pemerintah akan bisa ditekan dan didesak secara perlahan-lahan.

"Kami menerapkan strategi perang gerilya, karena dalam kenyataannya negara kami merupakan gugusan kepulauan yang akan membawa keuntungan yang besar pada

⁶¹⁾ Davis, *The Philippines*, hal. 108 dan lihat juga Chapman, hal. 108

kami dan kemalangan yang besar bagi musuh," demikian tulis Sison dalam hampir semua dokumen pembaharuan CPP. "Musuh akan dipaksakan untuk membagi perhatian dan kekuatannya, bukan hanya ditunjukan kepada daerah disekitar kota, tetapi juga di berbagai pulau. Pada setiap front pertempuran, tentara-tentara komunis (*Red soldiers*) harus menghindari babak-babak pertempuran dengan kesatuan-kesatuan musuh yang lebih besar. Musuh akan dibuat kehabisan tenaganya karena berperang seperti menampar udara "62)

Walaupun strategi perang gerilya ini memprioritaskan pembangunan unit-unit pasukan dan basis-basis gerilya di wilayah pedesaan dan pedalaman, namun pembangunan kekuatan gerilya di perkotaan juga mendapat perhatian yang cukup seimbang. Keberadaan unit-unit gerilya di perkotaan memang sangat diperlukan sekali untuk memperlemah kekuatan militer pemerintah di pusat-pusat kota. Sehingga hal ini nantinya akan mempermudah unit-unit gerilya dari wilayah pedesaan maupun pedalaman untuk memasuki dan menduduki kota-kota. Dalam konteks ini, unit-unit gerilya dari wilayah pedesaan dan pedalaman memang mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup besar pada mobilitas unit-unit gerilya di perkotaan.

Dalam bidang politik, CPP mengambil strategi pembentukan sebuah front nasional yang mengarah pada pen-

62) Chapman, hal. 109

dirian sebuah aliansi atau koalisi dari berbagai organisasi massa maupun partai yang mempunyai tujuan perjuangan searah dengan golongan sayap kiri. Perjuangan legal maupun ilegal dari front nasional melalui protes massa, pemboikotan, pemogokan dan taktik-taktik sejenisnya, diharapkan akan membantu mobilisasi perjuangan bersenjata CPP.

Dalam bukunya, *Rectify Errors and Rebuild the Party*, Sison mencatat bahwa hambatan proses revolusi adalah imperialisme Amerika Serikat dan dominasi semi feodal kelas tuan tanah. Untuk mengimbangnya, Sison mengusulkan penciptaan persekutuan nasional secara luas dari semua kelas dan lapisan masyarakat. Karena sifat masyarakat Filipina yang setengah kolonial dan setengah feodal, tahap revolusi sekarang ini tidak bisa tidak harus mengambil karakter demokrasi nasional. Sebelum revolusi sosialis dapat terjadi, partai komunis harus membayar terlebih dahulu dengan revolusi demokrasi nasional dari jenis baru, yaitu revolusi demokrasi rakyat. Jadi penekanan usaha dalam bidang politik didasarkan pada penguatan koalisi dan penetapan front-front politik dimana para simpatisan dapat diidentifikasi sambil melindungi kepentingan CPP. 63)

Menurut gagasan Sison, formasi front nasional yang akan dibentuk nanti merupakan gabungan dari sejumlah

63) Kessler, hal. 60

organisasi massa yang berafiliasi pada sebuah organisasi induk yang secara politis dikuasai oleh CPP. Organisasi induk yang dibentuk dan dikuasai oleh CPP inilah yang akan mempengaruhi golongan borjuis nasional dan kekuatan-kekuatan kelas menengah untuk bergabung dalam front nasional. Selain itu, front nasional yang dibentuk tersebut harus mempunyai sikap yang jelas sebagai front kesatuan yang anti fasis, anti feodal, dan anti imperialis secara keseluruhan. 64)

Dipandang dari sudut politik dan ekonomi, keberadaan front nasional tersebut akan memberi keuntungan-keuntungan cukup besar bagi CPP. Secara politis, keabsahan perjuangan CPP akan lebih diakui oleh masyarakat berkat bergabungnya berbagai organisasi massa yang bersifat legal dan lapisan-lapisan masyarakat kelas menengah dalam sebuah wadah perjuangan yang dimotori oleh golongan komunis. Selain itu, dengan bergabungnya sejumlah organisasi massa dalam front nasional yang dibentuk oleh CPP, maka kader-kader partai akan lebih mudah memanipulasi dan mengemudikan arah perjuangan berbagai organisasi massa tersebut. Secara ekonomis, dengan bergabungnya sejumlah organisasi massa yang mayoritas dimotori oleh kalangan menengah, CPP akan lebih mudah mendapat bantuan finansial untuk perjuangan front nasional dalam bidang politik.

64) Gregg R. Jones, Red Revolution : Inside The Philippines Guerrilla Movement, Westview Press, San Fransisco, 1989, hal. 145

B. Peran New People Army (NPA) Dalam Pelaksanaan Strategi Militer CPP

Sebagai sayap militer CPP, NPA mempunyai peranan dan tanggung jawab cukup besar dalam usaha pelaksanaan strategi perang gerilya. Selain bertanggung jawab untuk merekrut dan membina anggota-anggota gerilya, NPA juga mempunyai kewajiban membangun, mengkonsolidasikan dan mengontrol keberadaan unit-unit gerilya di seluruh Filipina. Melalui kepemimpinan NPA ini, operasi-operasi militer gerilya komunis dikonsolidasikan dan dikoordinasikan dari front ke front di seluruh kepulauan untuk menekan kekuatan militer pemerintah. Sehingga dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan taktik perang gerilya memang sangat ditentukan oleh daya inovasi, teknik-teknik penguasaan medan dan dedikasi yang tinggi dari seluruh personel anggota maupun pimpinan NPA.

Menurut pertimbangan Jose Maria Sison, perlawanan NPA baik di daerah pedalaman, pedesaan maupun perkotaan tidak dapat hidup diluar perlindungan basis massanya. Untuk keberhasilan proses perjuangannya, NPA membutuhkan ketergantungan pada intimitas organik yang terikat dengan para petani, masyarakat desa dan warga kota yang merupakan laut dimana para gerilya bisa berenang bagaikan ikan. ⁶⁵⁾ NPA akan menjadi aktif apabila basis massa

⁶⁵⁾ E. San Juan, Crisis In The Philippines : The Making of a Revolution, Bergin and Carvey Publishers Inc., Massachusetts, 1986, hal. 136

sudah dibangun. Basis massa sangat diperlukan untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan, tempat perlindungan maupun informasi-informasi penting mengenai keberadaan tentara-tentara pemerintah.

Untuk membangun basis massa, NPA biasanya menerapkan strategi mempengaruhi warga masyarakat dengan bertindak sebagai pembela keadilan untuk melawan para penindas rakyat. Tujuan terutama dari taktik ini adalah untuk mencapai suatu reputasi tertinggi NPA sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagai ilustrasi dari pelaksanaan strategi tersebut dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa berikut ini.

Pada bulan Maret 1982, gerilyawan NPA membunuh mayor angkatan darat Pablo Sola di Kabankalan, Propinsi Occidental. Di mata rakyat, mayor tersebut merupakan "perampas tanah-tanah tak bertuan" yang telah digarap para petani selama bertahun-tahun. Selain itu Mayor Sola juga diduga kuat mendalangi pembunuhan sembilan orang petani yang pro NPA di wilayah Kabankalan. Pembunuhan terhadap mayor tersebut menimbulkan simpati para petani Kabankalan terhadap perjuangan NPA. ⁶⁶⁾ Sebagai contoh lainnya adalah peristiwa pembunuhan Magno Yabut, adik seorang walikota (mayor) di wilayah Makati pada bulan Juli 1987. Magno Yabut dibunuh oleh NPA karena telah memperkosa dua wanita, menikam seorang lelaki dan men-

⁶⁶⁾Chapman, hal. 118

teror seorang pejabat daerah di sebuah kota kecil. 67) Melalui taktik ini, NPA semakin banyak mendapat simpati dari warga masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami penindasan dari sejumlah oknum aparat pemerintah. Bahkan kemudian, dalam pandangan publik, kelompok-kelompok gerilyawan NPA ini dianggap sebagai sebuah gerombolan Robin Hood.

Selain menerapkan strategi diatas, dalam usahanya membangun basis massa, NPA juga melakukan propaganda-propaganda yang bersifat mendiskreditkan pemerintah. Untuk tugas tersebut NPA mempunyai sebuah tim tersendiri yang disebut *Armed Propaganda Team* (APT). Tim ini bertugas melakukan infiltrasi ke wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan untuk menyebarkan propaganda yang berisi hasutan-hasutan maupun isu-isu negatif mengenai keburukan-keburukan pemerintah. Melalui usaha ini diharapkan warga masyarakat mempunyai perasaan anti pati terhadap pemerintah, dan memihak NPA. 68)

Untuk keperluan membangun basis massa, NPA juga sering melakukan kegiatan-kegiatan bersifat sosial untuk menarik simpati warga masyarakat. Suatu laporan dalam harian *Wall Street Journal* (21 Juni 1980) melukiskan integrasi NPA dengan warga Igorot di wilayah timur laut Luzon. Kadexter, pimpinan kesatuan NPA di wilayah ter-

67) Kessler, hal. 78

68) Chapman, hal. 108

sebut, mencatat bahwa, "selain terlibat dalam aksi-aksi militer, kami juga sering melakukan aksi-aksi sosial untuk kepentingan masyarakat. Kami membantu pelaksanaan irigasi, perbaikan pertanian dan beberapa jenis pekerjaan lainnya, termasuk membangun rumah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari perjuangan militer kami, karena itu merupakan suatu propaganda"⁶⁹⁾ Seorang wartawan India, Ajit Roy dari *Economic and Political Weekly* yang mewawancarai para kader NPA juga membuat kesimpulan bahwa NPA adalah "pembawa perubahan kehidupan desa yang miskin secara terus menerus meningkatkan kesadaran sosial dan tingkat pendidikan, seperti mengambil bagian dalam penyuluhan tentang sanitasi dan kesehatan."⁷⁰⁾

NPA dalam usahanya membangun basis massa dengan menerapkan strategi-strategi diatas, ternyata menunjukkan keberhasilan-keberhasilan yang cukup berarti. Dalam tahun 1986, NPA telah berhasil mendapatkan dukungan aktif lebih dari 12 juta petani, pekerja perkebunan, nelayan dan anggota-anggota suku minoritas. Dari jutaan orang ini ada suatu inti kekuatan pejuang yang berjumlah sekitar satu juta. Sedangkan 50.000 kader terpilih NPA, menjadi pimpinan sejumlah basis massa di berbagai wilayah yang berbeda.⁷¹⁾

⁶⁹⁾ Juan, hal. 137

⁷⁰⁾ Ibid, hal. 138

⁷¹⁾ Davis, Revolutionary., hal. 49-50

Secara strategis militer, NPA membagi wilayah operasi militernya menjadi dua. Unit-unit gerilya yang mempunyai wilayah operasi di perkotaan dan unit-unit gerilya yang beroperasi di wilayah pedesaan maupun pedalaman. Antara unit-unit gerilya yang beroperasi di wilayah perkotaan dan unit-unit gerilya yang beroperasi di wilayah pedesaan maupun pedalaman, pada dasarnya mempunyai pola dan taktik perlawanan yang cukup berbeda.

Unit-unit gerilya yang mendominasi perlawanan di wilayah pedesaan maupun pedalaman diorganisir oleh Main Regional Guerrilla Units (MRGU) dan Secondary Regional Guerrilla Units, (SRGU). Dalam usahanya menekan kekuatan militer pemerintah, unit-unit gerilya ini cenderung bergerak dalam kelompok-kelompok gerilya dengan jumlah personel cukup besar (antara 30 sampai 150 prajurit). Taktik utama perlawanan adalah melakukan penyergapan dan penyerangan sporadis terhadap pos-pos dan markas-markas militer pemerintah, juga patroli pasukan-pasukan pemerintah.

Tujuan spesifik dari setiap penyergapan dan penyerangan adalah untuk mengumpulkan senjata (agaw armas), karena dalam sebuah revolusi setiap senjata baru pada dasarnya sama nilainya dengan seorang serdadu baru. Namun efek yang paling akhir dari setiap usaha penyergapan dan penyerangan adalah tujuan yang bersifat psikologis dan politis. Dalam banyak kasus, militer tidak pernah mau berpatroli di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap



usaha-usaha penyerangan pihak gerilya NPA. Apalagi di daerah-daerah yang warganya simpati terhadap NPA. Ketidakterdayaan dan ketidakmampuan militer untuk menghadapi teror yang dilakukan oleh NPA seringkali mengakibatkan tuan-tuan tanah kehilangan perlindungan. Sehingga mereka cenderung menyetujui tuntutan-tuntutan para pekerja di wilayah pertaniannya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka. 72)

Untuk memaksimalkan gerakannya unit-unit gerilya yang bertempur di wilayah pedesaan maupun pedalaman cenderung menerapkan taktik pemusatan kekuatan dan penyebaran kekuatan (*concentration and dispersion*) menurut situasinya. Apabila mereka berhadapan dengan unit pasukan pemerintah yang cukup kecil mereka akan menerapkan taktik pemusatan kekuatan untuk menggilas kekuatan musuh. Tetapi bila mereka berhadapan dengan kesatuan tentara pemerintah yang cukup besar mereka akan menyebar dan menghilang secara tiba-tiba untuk menghindari kontak senjata secara langsung. 73)

Di wilayah-wilayah perkotaan, perlawanan NPA dikoordinir oleh *Army City Partisan Units* (ACPU). Sebagai pelaksanaan operasi kota, ACPU selanjutnya dibagi ke dalam *Regular Partisan Operating* (RPO) dan *Special Partisan Operating* (SPO). RPO menyerang dengan target kecil,

72) Chapman, hal. 115

73) Kessler, hal. 72

seperti para perwira militer dan serdadu-serdadu biasa. Sedangkan SPO mempunyai target untuk menyerang para pejabat tinggi pemerintah melalui operasi yang lebih rumit. ⁷⁴⁾

Unit-unit gerilya di wilayah perkotaan cenderung bergerak dalam kelompok-kelompok kecil, dengan jumlah personel antara 1-4 orang. Unit-unit kecil gerilya ini lebih dikenal, dengan sebutan *Sparrow Units* (Unit-unit Burung Pipit). Anggota-anggota dari *Sparrow Units* sebagian besar mempunyai keahlian menembak jarak jauh (*Sniper*). Dalam operasinya *Sparrow Units* menyempurnakan suatu sistem intelijen yang memungkinkan mereka untuk bergerak ke dalam kota dengan leluasa tanpa menarik perhatian, sehingga dapat membunuh korban yang diincar-nya. Biasanya mereka hanya menyergap dan membunuh polisi atau seorang pejabat pemerintah. Ini membutuhkan pengamatan yang cermat terhadap sasaran, memperhitungkan posisi serta situasi penyergapan yang terbaik dan membangun sebuah tempat perlindungan. ⁷⁵⁾ Istilah "burung pipit" menunjukkan kemampuan unit gerilya ini untuk bergerak cepat menuju korban, membunuhnya dan menghilang sebelum kekuatan yang lebih besar tiba. Metode yang paling istimewa adalah suatu tembakan jitu dari belakang dan

⁷⁴⁾ *Ibid*,. hal. 71-72

⁷⁵⁾ *Ibid*, hal. 77

menuju sasaran utama pada batok kepala. 76) Fransisco, seorang tokoh pimpinan NPA dari Propinsi Isabela menjelaskan, "terbanyak dari pembunuhan yang dilakukan *Sparrow Units* dilakukan oleh gerilyawan-gerilyawan berusia muda yang mendapat latihan cukup intensif. Kami memilih anak-anak muda yang polos untuk bertugas dalam *Sparrow Units*, karena mereka dapat bergerak dengan mudah tanpa perhitungan. Selain membunuh aparat dan birokrat pemerintah yang anti CPP, alasan mereka membunuh juga untuk memperoleh senjata." 77)

Untuk melancarkan komunikasi komando, unit-unit gerilya di wilayah perkotaan, pedesaan maupun pedalaman menggunakan IC-2N yang bisa digenggam atau lebih canggih lagi dengan menggunakan sistem digital O2N radio transceivers. Transceivers ini dibeli/diberi oleh para pendukung lokal dan asing atau dirampas dari musuh, demi melancarkan komunikasi antar unit. Penggunaan sistem komunikasi yang canggih ini merupakan bagian cukup penting dalam melangsungkan rangkaian operasi-operasi militer. 78)

76) Chapman, hal. 117

77) Ibid

78) Davis, Revolutionary, hal. 51

C. Peran National Democratic Front (NDF) dalam Pelaksanaan Strategi Politik CPP

Sebagai sayap politik CPP dan organisasi induk front nasional yang dibentuk oleh CPP, National Democratic Front bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang telah digariskan oleh Komite Sentral. Selain itu NDF juga bertanggung jawab untuk membangun, mengkoordinir dan mengontrol aktifitas-aktifitas politik front nasional secara keseluruhan. Untuk merekrut berbagai organisasi massa agar bergabung dengan front nasional, NDF selalu melakukan infiltrasi-infiltrasi dan mendorong berbagai organisasi tersebut untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam front nasional. Untuk kepentingan tersebut, NDF selalu menjanjikan suatu pemerintahan koalisi demokrasi yang memberikan kebebasan pada setiap kekuatan politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Taktik terutama yang sering digunakan oleh NDF dalam perjuangannya, adalah mengorganisir berbagai aksi massa untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan dan pemboikotan politik. Melalui taktik-taktik tersebut NDF berniat merongrong kekuasaan politik pemerintah dan menggoyahkan stabilitas politik dalam negeri. Dengan strategi tersebut, NDF berusaha menyiapkan dan mematangkan situasi dalam negeri Filipina untuk masuk dalam proses akhir revolusi.

Keberhasilan protes para mahasiswa menentang biaya kuliah yang tinggi pada pertengahan tahun 1977, telah memberikan inspirasi kepada para tokoh NDF untuk membuat perencanaan-perencanaan guna meningkatkan gelombang protes/demonstrasi secara lebih intensif di sejumlah kota. Para pemimpin NDF berkeyakinan bahwa berbagai organisasi massa maupun partai politik oposisi yang moderat pasti akan bergabung dengan aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa yang bersifat menentang pemerintahan Marcos. ⁷⁹⁾ Melalui "taktik parliament of the streets" (parlemen jalanan), NDF berniat mengacaukan stabilitas politik di wilayah-wilayah perkotaan dan menekan kekuasaan pemerintah melalui "jalan yang lebih damai", tanpa membuang sebutir peluru pun. Para kader NDF yang merancang aksi-aksi demonstrasi biasanya menggunakan isu-isu politik penting dalam negeri sebagai "bahan" untuk memobilisasi massa dan menyulut aksi-aksi unjuk rasa.

Selain taktik "parliament of the streets", atau parlemen jalanan dalam usaha perjuangannya NDF juga sering menggunakan taktik pemogokan massal (*Welga ng bayan's*). Pemogokan massal difokuskan untuk mengacaukan sistem transportasi, pabrik-pabrik dan sektor-sektor pendidikan. Pemogokan massal adalah "bentuk koordinasi multi sektoral yang umum dalam perjuangan di kota-kota yang boleh jadi juga mencakup daerah pinggiran kota,"

⁷⁹⁾ Jones, hal. 113

demikian Ang Bayan pada bulan Desember 1984. Ang Bayan merupakan jurnal resmi CPP yang diterbitkan secara berkala. Tujuan pemogokan massal yang tetap, adalah melumpuhkan kekuatan pemerintah dan "menggoyahkan dasar negara fasis". Itu berarti menyiapkan masyarakat secara politis untuk revolusi. Kemudian memantapkan langkah awal untuk meningkat ke strategi ofensif.⁸⁰⁾ Usaha pemogokan massal yang sering dilakukan adalah pemogokan transportasi. Mematikan sistem transportasi berarti mencegah setiap orang dari kegiatan untuk bekerja atau kegiatan-kegiatan lain untuk kepentingan negara. Anggota NPA biasanya membantu menjalankan blokade jalan dan kegiatan lain seperti melempar batu pada siapa saja yang tetap menjalankan kendaraan. Pemogokan massal nampaknya seperti aksi yang tidak penting, namun ketika pemogokan politis mulai dikembangkan oleh NDF, tindakan brutal yang mengarah pada kekacauan akan lebih banyak terjadi. Dalam aksi pemogokan massal kelompok-kelompok sektoral, seperti kaum tani, mahasiswa, nelayan dan pengemudi, selalu dilibatkan dibawah bendera CPP-NDF. Dalam setiap aksi pemogokan massal, lagu-lagu protes dinyanyikan dengan diiringi gitar dan disiarkan melalui loudspeaker pada malam hari. Lelucon-lelucon politis kadang-kadang juga dipentaskan. Biarawati dan sejumlah tokoh gereja yang pro NDF juga sering dilibatkan untuk mengorganisir aksi pemogokan,

⁸⁰⁾ Kessler, hal. 86

mengambil bagian untuk menyebarkan konfrontasi antara rakyat dengan militer.

Selain menggunakan taktik "parliament of the streets" (parlemen jalanan) dan taktik pemogokan massal, dalam usaha perjuangannya NDF juga sering menggunakan taktik pemboikotan terhadap peristiwa-peristiwa politik penting yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, tindakan yang sering dilakukan oleh NDF adalah melakukan pemboikotan-pemboikotan terhadap pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Nasional dan presiden. Tujuan terutama dari taktik ini adalah untuk mengacaukan proses penyelenggaraan pemilu dan mengurangi keabsahan hasil pemilu. Ketidaklancaran proses pemilu yang menjadi bagian penting mekanisme politik penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara, secara politis memang bisa memberikan dampak buruk bagi kredibilitas dan kewibawaan pemerintah penyelenggara pemilu. Dalam kenyataannya di lapangan, pemboikotan-pemboikotan pemilu yang diserukan oleh NDF selalu diikuti oleh seluruh organisasi-organisasi yang menjadi afiliasinya, juga berbagai golongan dalam masyarakat yang simpati terhadap perjuangan NDF.

Selama masa pemerintahan Presiden Marcos, NDF tercatat empat kali melakukan pemboikotan terhadap pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Nasional dan presiden. Pada tahun 1978 NDF melakukan pemboikotan

terhadap pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Nasional Sementara (*Interim National Assembly*). Kemudian disusul pada tahun 1981, NDF bersama dengan kelompok-kelompok oposisi mengadakan pemboikotan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih presiden. Tahun 1984 sekali lagi NDF melakukan pemboikotan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Nasional. Terakhir pada tahun 1986 NDF melakukan pemboikotan terhadap pemilu yang diselenggarakan untuk memilih presiden. 81)

81) Ibid, hal. 81

BAB V

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
PRESIDEN MARCOS UNTUK MENUMPAS PEMBERONTAKAN
PARTAI KOMUNIS FILIPINA (C P P)

A. Kondisi Angkatan Bersenjata Filipina pada Masa
Pemerintahan Presiden Marcos dan Dampaknya Bagi Usaha
Pemadaman Pemberontakan Partai Komunis Filipina
(Communist Party of Philippines)

Selama pemerintahan Presiden Ferdinand E. Marcos terjadi perubahan-perubahan radikal dalam tubuh angkatan bersenjata Filipina. Perubahan-perubahan ini tidak saja berkenaan dengan struktur dan ukuran besarnya, tetapi juga dalam nilai-nilai dan perilakunya. Yang paling mendasar adalah terjadinya pergeseran peran militer yang semula bersifat non politis berubah menjadi politis. Selain itu, dalam proses perekrutan para perwira dan personel militer yang akan ditempatkan dalam posisi-posisi vital, juga menunjukkan perubahan-perubahan yang bersifat prosedural. Penempatan para perwira dan personel militer dalam posisi-posisi penting yang semula ditentukan oleh tingkat profesionalitas dan prestasi, maka pada masa pemerintahan Marcos sangat ditentukan sekali oleh daerah asal, kesetiaan dan hubungan kekeluargaan. Hal ini juga berlaku dalam proses kenaikan pangkat dalam jenjang militer.

Sebelum Marcos memulai masa jabatannya sebagai Presiden Filipina pada tahun 1965, pihak militer Filipina memainkan peranan yang pada dasarnya non politis. Angkatan bersenjata negara tersebut yang dibentuk dengan mengikuti angkatan bersenjata Amerika Serikat sebagai contoh teladan, dulu biasa berperan sebagai bawahan yang netral dari pemerintahan sipil.⁸²⁾ Peranan militer yang non politis ini mengalami perubahan dibawah Presiden Marcos. Hal ini terutama ditunjukkan dengan peristiwa diberlakukannya UU Darurat Perang tanggal 22 September 1972 pada masa jabatan Presiden Marcos yang kedua (1969-1973). Pemberlakuan UU Darurat Perang tersebut akibat terjadinya berbagai aksi kekerasan politik Filipina, diambil dengan persetujuan dan partisipasi aktif sekelompok perwira senior yang dekat dengan presiden. Dengan diberlakukannya UU Darurat Perang tahun 1972, maka pemerintahan Marcos memiliki keabsahan untuk memperpanjang masa kekuasaannya sampai stabilitas keamanan dalam negeri Filipina dianggap telah pulih kembali. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya UU Darurat Perang tersebut dimanfaatkan oleh Marcos untuk mempertahankan kedudukannya dan kekuasaannya.

Sesudah tahun 1972, pihak militer menjadi benteng pemerintahan Marcos yang penting, aktif dan memiliki berbagai hak istimewa. Kehadiran militer secara besar-

⁸²⁾Bresnan, hal. 179

besaran dalam kehidupan sipil sangat dirasakan dengan mengalirnya orang-orang militer ke dalam instansi-instansi pemerintah sipil dan badan-badan perusahaan sejak berlakunya UU Darurat Perang. Dalam parlemen, banyak jabatan penting yang mulai beralih ke tangan golongan militer. ⁸³⁾ Untuk mengetahui perkembangan kekuasaan angkatan bersenjata Filipina pada masa pemerintahan Marcos, lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran III.

Setelah diberlakukannya UU Darurat Perang, Marcos juga semakin mengintensifkan perekrutan para perwira militer yang berasal dari Ilocos, daerah kampung halamannya. Dalam penerimaan calon prajurit pun diutamakan mereka yang berasal dari Ilocos, dan yang kemudian paling banyak memasuki satuan-satuan keamanan dan intelijen yang ditempatkan di Manila dan sekitarnya. Satuan-satuan tersebut antara lain, pasukan Komando Keamanan Presiden (*Presidential Security Command*) yang terdiri dari 15.000 serdadu, Badan Keamanan dan Intelijen Negara (*National Intelligence and Security Authority*), Komando Constabulary Metropolitan Manila (*Metrocom*) dan Divisi II Angkatan Darat. Pemusatan kekuatan secara besar-besaran di ibukota negara dan wilayah sekitarnya ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sebesar-besarnya demi

⁸³⁾ Nadeak, hal. 51

keamanan presiden sekeluarga serta para anggota regimnya. 84)

Secara umum, para perwira militer maupun seluruh prajurit yang menjadi anggota kesatuan-kesatuan diatas mendapat fasilitas-fasilitas ekonomi maupun politik yang cukup besar dari Marcos. Meningkatnya jumlah personel militer dari daerah asal presiden, merupakan satu contoh saja dari tendensi yang bertambah besar untuk menimbang penugasan dan kenaikan pangkat bukan berdasarkan kemampuan/kesenioran, melainkan pilih kasih, kesetiaan dan hubungan kekeluargaan. Pendek kata, ikatan-ikatan primordial dan rangsangan-rangsangan tradisional semakin banyak dijadikan andalan, bukannya nilai-nilai yang umumnya diasosiasikan dengan profesionalisme militer. Kondisi semacam ini sedikit banyak menyebabkan menurunnya respek kalangan umum terhadap pihak militer.

Di lain pihak, pertahanan nasional tetap merupakan tugas utama pasukan-pasukan yang berada di luar lingkungan kota besar Manila, yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta sekian banyak satuan yang memikul tugas berbahaya dan sering menimbulkan frustrasi : memerangi pemberontakan komunis dan Moro. Pada zaman Marcos, yang disertai tugas ini adalah para perwira dan prajurit yang dinilai paling tidak cocok untuk disertai fungsi mempertahankan keutuhan rezim, jadi yang bukan berasal dari

84) Bresnan, hal. 81

Propinsi Ilocos, perwira-perwira yang diragukan kesetiannya pada presiden, dan perwira-perwira muda yang masih harus membuktikan dulu kemampuan mereka. Kehidupan mereka ini tidak dapat dikatakan enak dan imbalan yang diterima sangat kecil, kecuali jika mau menambah sendiri dari hasil bumi. Perbekalan mereka serba tidak memadai, karena perlengkapan yang sudah dibeli untuk mereka dijual lagi untuk memperkaya kalangan perwira atasan mereka. Belum lagi pembayaran gaji yang kadang-kadang terlambat. Mereka yang paling banyak memikul akibat ketidaksenangan kalangan sipil terhadap pemerintah, terutama di daerah-daerah di mana pengaruh NPA sangat terasa. 85)

Proses politisasi di kalangan militer dan adanya usaha-usaha diskriminasi yang dilakukan pihak pemerintah dalam penanganan dan pembinaan angkatan bersenjata, secara politis semakin mempertajam proses disintegrasi dalam tubuh angkatan bersenjata Filipina. Tanda-tanda adanya proses disintegrasi dalam tubuh angkatan bersenjata semakin terlihat ketika antara tahun 1981 dan 1982 muncul suatu gerakan yang menamakan diri Gerakan Pembaharuan Angkatan Bersenjata (*Reform the Armed Forces Movement*). Gerakan yang diprakarsai oleh para perwira muda yang tidak setuju dengan kebijaksanaan militer para perwira seniornya yang dekat dengan Marcos ini, bertekad akan memulihkan profesionalisme di dalam tubuh angkatan

85) Ibid, hal. 184

bersenjata dan membangkitkan kembali respek masyarakat umum terhadap kredibilitas pihak militer. Gerakan ini juga menyerukan persatuan, penegasan disiplin yang lebih baik, kualitas latihan militer yang lebih meningkat, manajemen yang lebih rasional dan pengarahannya terhadap konstitusi. ⁸⁶⁾ Munculnya Gerakan Pembaruan Angkatan Bersenjata (RAM) tersebut sebetulnya juga merupakan reaksi terhadap kepemimpinan kepala staf angkatan bersenjata Filipina, Jenderal Fabian Ver. Ketika itu, perwira muda hanya bisa menduduki jabatan penting apabila dekat dan setia kepada Ver. Jenjang kenaikan pangkat tersendat-tersendat. Banyak perwira muda yang seharusnya sudah disertai pos-pos strategis, tetap memegang jabatan lama yang membosankan dan tak berarti. Di lain pihak, perwira-perwira senior yang sudah tua terus dipertahankan. Kepemimpinan Jenderal Ver ini menimbulkan frustrasi di kalangan perwira-perwira muda. Mereka merasa sudah berprestasi, tetapi disepelkan. Karena tak tahan lagi, perwira-perwira muda tersebut berusaha mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui gerakan yang telah dijelaskan di atas. ⁸⁷⁾ Munculnya gerakan pembaruan di dalam tubuh angkatan bersenjata Filipina pada awal tahun 1980-

⁸⁶⁾ Lihat Nadeak, hal 54-55

⁸⁷⁾ Djati Surendro, "RAM : Gerakan Perwira Penasaran", Jakarta Jakarta, no. 61, 4-10 September 1987, hal. 10

an ini, secara tidak langsung semakin memperlemah kekom-pakan dan persatuan di kalangan militer.

Adanya berbagai permasalahan dan ketegangan dalam tubuh militer sejak tahun 1972 sampai awal tahun 1980-an, akhirnya berdampak buruk bagi usaha peningkatan kualitas dan mutu angkatan bersenjata Filipina secara keseluruhan. Karena keadaan tersebut, angkatan bersenjata Filipina tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berlatih secara teratur dalam suatu sistem yang jelas. Akibatnya, angkatan bersenjata Filipina tidak pernah menjadi tentara profesional dalam pengertian yang sebenarnya. Apabila diamati secara lebih mendalam, lemahnya dan menurunnya kualitas angkatan bersenjata Filipina juga sangat dipengaruhi tingkat kesejahteraan mereka yang amat minim. Terutama para personel militer Filipina yang ditempatkan di luar wilayah Manila dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan mereka bekerja tanpa motivasi tempur yang tinggi. Kurangnya motivasi bisa terlihat dari tingkat disiplin mereka yang amat rendah dan kurangnya ketaatan untuk melaksanakan prosedur militer yang ditetapkan.

Melihat kondisi angkatan bersenjata Filipina pada masa pemerintahan Marcos, kelihatannya tidak begitu besar kemungkinan bagi pemerintah untuk dapat menahan pemberontakan CPP, apalagi menumpasnya. Ketidaktetapan pasukan-pasukan pemerintahan dalam memadamkan pemberontakan golongan komunis juga sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan Marcos yang terlalu memusatkan perhatiannya pada

usaha-usaha pengamanan kedudukannya daripada masalah keamanan dalam negeri secara global. Dalam usahanya memadamkan pemberontakan CPP, rezim Marcos cenderung mengambil langkah-langkah bersifat militer. Melalui operasi-operasi militer konvensional yang dilakukan secara intensif dengan dukungan dana dan persenjataan dari Amerika Serikat, Marcos berkeyakinan akan dapat menumpas pemberontakan tersebut. Tetapi operasi-operasi militer yang diselenggarakan seringkali dilakukan setengah hati dan menggunakan kekuatan militer yang masih diragukan kehandalannya dan kualitasnya. Akibatnya, operasi-operasi militer yang dilakukan seringkali mengalami kegagalan-kegagalan.

B. Operasi Anti Pemberontakan (*Counter Insurgency Operation*)

Semenjak diberlakukannya UU Darurat Perang tahun 1972 menyusul terjadinya berbagai aksi kekerasan politik di Filipina, pemerintahan Marcos mulai melakukan operasi-operasi militer intensif untuk menghancurkan pemberontakan CPP. Operasi-operasi militer konvensional yang dilakukan oleh Marcos ini lebih dikenal dengan sebutan Operasi Anti Pemberontakan (*Counter Insurgency Operation*). Tujuan terutama dari operasi ini adalah, menekan dan menghancurkan kekuatan-kekuatan gerilya NPA diseluruh wilayah Filipina dengan menggunakan kekuatan militer secara terpadu.

Adapun inti kekuatan militer yang digunakan oleh Marcos untuk menghancurkan CPP adalah, Angkatan Darat dan Police Constabulary yang ditempatkan dibawah koordinasi wakil kepada staf angkatan bersenjata. Angkatan Darat terdiri dari lima divisi infanteri ditambah dua batalyon lepas (*coin battalion*) dan satu resimen pasukan khusus yang dikenal dengan sebutan *Scout Ranger*. Selain itu masih ada unsur pendukung berupa satu resimen kavaleri yang terdiri dari sejumlah tank *Scorpion* dan beberapa jenis panser. 88)

Diantara kesatuan-kesatuan militer yang terlibat dalam *Counter Insurgency Operation*, yang cukup terkenal ketangguhannya adalah kesatuan *Scout Ranger*. *Scout Ranger* merupakan satuan elit angkatan darat Filipina. Mereka dikenal sangat disiplin dan agresif, serta mempunyai karakter yang sangat keras. *Scout Ranger* mempunyai reputasi yang cukup bagus sebagai "pasukan pemburu" gerilyawan NPA. Respek masyarakat umum terhadap kesatuan ini mulai menurun ketika kesatuan *Scout Ranger* yang ditempatkan di Propinsi Isabela membantai sejumlah penduduk sipil yang mengadakan unjuk rasa memprotes kebijaksanaan pemerintah pada tahun 1985. 89)

Secara global, operasi-operasi militer ini diarahkan di wilayah-wilayah pedesaan dan pedalaman yang diduga

88) Nadeak, hal. 217

89) Chapman, hal. 104

kuat menjadi pangkalan-pangkalan operasi pasukan NPA. Seperti pasukan Amerika Serikat dalam perang Vietnam, pasukan Filipina yang terlibat dalam operasi militer ini, juga dibagi dalam sejumlah peleton, yang berkekuatan sekitar 30 orang untuk memburu para gerilya NPA di wilayah-wilayah pedesaan dan pedalaman. Selain sulit untuk diketahui, peleton-peleton ini lebih mudah bergerak untuk mengepung dan menyergap regu-regu pasukan gerilya NPA. Tetapi apabila mereka berhadapan dengan kekuatan musuh lebih besar, melalui radio komunikasi mereka bisa meminta bantuan unit pasukan pendukung atau helikopter penyerang, juga pesawat pembom.

Sejak berdirinya NPA pada tahun 1969, pasukan-pasukan Angkatan Darat Filipina dan PC yang menangani *Counter Insurgency Operation* cenderung melakukan operasi-operasi militer secara sporadis, tanpa memperhitungkan sasaran-sasaran secara lebih teliti. Pelaksanaan operasi militer seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang atau menggunakan strategi yang salah.⁹⁰⁾ Seringkali setelah suatu operasi militer dilaksanakan, tentara kembali ke tangsi mereka, dan pasukan-pasukan yang ditempatkan di daerah-daerah rawan hanya berdiam di pos mereka tanpa usaha untuk mengambil inisiatif penyerangan. Mereka cuma menunggu kalau gerilyawan NPA menyerang mereka,

⁹⁰⁾ Nadeak, hal. 218

sehingga sering mereka disergap secara mendadak tanpa bisa melawan. 91)

Dari laporan-laporan yang masuk, memang terlibat bahwa dalam banyak kasus mutu pasukan Filipina, sulit untuk dibilang baik. Selain dikenal mempunyai teknik bertempur dan motivasi berjuang yang rendah, kebanyakan dari mereka sering melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prosedur-prosedur militer yang berlaku. Karena berintikan pasukan-pasukan yang kurang terlatih dan kurang terdidik, maka operasi-operasi militer yang digelar oleh pemerintah Filipina secara umum kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Rendahnya kualitas dan tingkat profesionalitas kesatuan-kesatuan militer yang terlibat dalam *Counter Insurgency Operation* ini memang sangat dipengaruhi oleh minimnya tingkat kesejahteraan mereka, fasilitas dan perlengkapan militer yang kurang memadai, serta adanya ketegangan-ketegangan dalam tubuh angkatan bersenjata pada waktu itu. Sehingga secara global, *Counter Insurgency Operation* yang menekankan pendekatan militer dalam usaha menghancurkan pemberontakan CPP, kurang mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Di lain pihak kekuatan militer NPA malah mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup luar biasa.

91) *Ibid.*, hal. 219

C. Operasi Stabilitas (*Oplan Katatagan*)

Setelah melihat perkembangan *Counter Insurgency Operation* yang ternyata kurang efektif untuk menghancurkan pemberontakan CPP, maka pemerintah Marcos mulai menerapkan strategi-strategi baru yang lebih inovatif untuk menekan dan menghancurkan kekuatan CPP. Pada awal tahun 1980-an, tepatnya tahun 1983, Marcos mulai merencanakan Operasi Stabilitas (*Oplan Katatagan*) untuk menghadapi pemberontakan CPP. Operasi Stabilitas ini berupaya memadukan operasi-operasi militer konvensional dengan langkah-langkah politik secara terpadu. Tujuan terutama operasi ini adalah, untuk merebut "hati dan pikiran rakyat". Pelaksanaan operasi ini digariskan melalui sebuah Surat Perintah 2-81 (*Letter of Instruction 2-81*) yang telah disetujui oleh Dewan Nasional Filipina. ⁹²⁾

Pelaksanaan Operasi Stabilitas (*Oplan Katatagan*) dirancang dalam empat fase : *Clearing Operations* (Operasi Pembersihan), yang dirancang untuk menghancurkan infrastruktur politik organisasi CPP; *Holding Operations* (Operasi Melekat), yang dirancang untuk menghancurkan sel-sel NPA dan membangun jaringan pertahanan lokal; *Consolidation Operation* (Operasi Konsolidasi), dirancang untuk memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat dan melakukan program-program pembangunan untuk kesejahteraan

⁹²⁾ Davis, *The Philippines*, hal. 132

masyarakat; dan *Development Operation* (Operasi Pembangunan) yang merupakan program jangka panjang yang ditujukan untuk mempersiapkan penarikan kembali unit-unit militer reguler dari wilayah-wilayah yang secara politis dan militer telah dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah. ⁹³⁾

Pada masa pemerintahan Marcos Operasi Stabilitas baru dapat dilaksanakan pada tahap satu sampai tiga, karena Marcos keburu "terjungkal" oleh Revolusi Pebruari 1986.

Clearing Operation (Operasi Pembersihan) berusaha memfokuskan kekuatan militer untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan militer NPA. Operasi ini biasanya berlangsung secara bertahap dalam beberapa minggu, dan sering memuncak dalam dialog antara warga masyarakat lokal dengan para perwira militer. Di bawah tekanan pihak militer, dialog ini biasanya menghasilkan suatu paket kerja sama untuk menghadapi perlawanan kaum gerilya NPA. Pada tahap Operasi Pembersihan ini pelanggaran-pelanggaran prosedur militer sering terjadi. Para sedadu pemerintah seringkali mengadakan perampasan secara paksa terhadap harta benda warga sipil yang diduga melakukan kerja sama dengan NPA. Bahkan secara brutal mereka sering melakukan penyiksaan dan pembunuhan. Sehingga kadang-kadang warga sipil tak berdosa menjadi korban. Selama tahun 1984-1985 dilaporkan bahwa banyak terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk yang diduga bekerja sama dengan

⁹³⁾ *Ibid.*, hal. 132-133

NPA oleh para serdadu pemerintah di wilayah Mindanao dan Samar. Tujuan terutama *Clearing Operation* untuk memutuskan jaringan komunikasi antara anggota NPA dan para pendukungnya di wilayah barangay (desa), memang berakibat munculnya ancaman-ancaman dan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan para tentara terhadap penduduk desa. 94)

Holding Operation (Operasi Melekat) difokuskan untuk memperkuat kemandirian komunitas-komunitas pedesaan (barangay) untuk bertanggungjawab mengamankan wilayahnya sendiri dari usaha-usaha ofensif yang dilakukan pihak CPP-NPA. Melalui operasi ini, seluruh warga maupun aparat desa berusaha dikondisikan untuk secara swadaya mampu mempertahankan wilayahnya dari segala infiltrasi maupun provokasi yang dilakukan pihak CPP-NPA. *Holding Operation* ini difokuskan terutama sekali di wilayah-wilayah pedesaan, karena secara geopolitis wilayah-wilayah ini sangat rawan sekali bagi usaha ofensif pihak NPA. 95)

Untuk memperkuat kemandirian komunitas-komunitas pedesaan, pihak militer selalu berupaya untuk menanamkan keyakinan pada warga maupun aparat desa bahwa militer selalu dibelakang mereka. Jadi mereka harus mau dan berani melaporkan segala aktifitas NPA yang berlangsung di wilayahnya. Lebih baik lagi kalau warga desa secara swadaya berani melawan NPA. Untuk menumbuhkan rasa per-

94) *Ibid.*, hal. 133

95) *Ibid.*, hal. 134

caya diri warga desa akan kemampuan mereka melawan NPA, pihak militer membentuk kesatuan-kesatuan para militer yang berfungsi sebagai badan pertahanan lokal. Kesatuan-kesatuan para militer yang tergabung dalam CHDF (*Civilian Home Defense Force*) ini beranggotakan warga sipil yang diberi latihan-latihan kemiliteran intensif. Kesatuan-kesatuan ini kemudian ditempatkan di wilayah-wilayah pedesaan di seluruh Filipina dan bertanggung jawab terhadap keamanan desa-desa tersebut. Dalam kenyataannya di lapangan, kesatuan-kesatuan CHDF ini sangat membantu kelancaran tugas-tugas pasukan reguler Filipina. Dalam usahanya menghancurkan sel-sel kekuatan CPP-NPA, pihak militer dalam operasi ini juga mendapat bantuan badan intelijen negara. Melalui bantuan badan ini, pihak militer akan lebih mudah mendeteksi "oknum-oknum aparat pemerintah desa yang melakukan hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak komunis. Sehingga dengan usaha ini pihak militer akan dapat menekan perluasan jaringan sel-sel kekuatan NPA di wilayah-wilayah pedesaan.

Tahap ketiga dari *Oplan Katatagan* adalah *Consolidation Operation* (Operasi Konsolidasi). Operasi ini difokuskan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dan melaksanakan program-program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Keberhasilan Presiden Magsaysay ketika memadamkan pemberontakan PKP (*Partindo Komunista ng Philipinas*) yang memadukan operasi militer dengan

kegiatan-kegiatan kemanusiaan, telah memberikan inspirasi para ahli strategi Marcos untuk menerapkan taktik serupa.

Taktik yang sebenarnya cukup efektif ini sayang dilaksanakan secara terlambat oleh pemerintahan Marcos, bahkan operasi ini dilaksanakan dengan usaha yang tidak sungguh-sungguh. Dalam konteks ini Jenderal Juan Ponce Enrile (Menteri Pertahanan pada masa Pemerintahan Marcos) pernah memberi komentar sebagai berikut. "Pemerintahan Marcos sebenarnya menyediakan dana sebesar \$ 50 juta untuk program ini. Pihak militer direncanakan akan membangun jaringan jalan-jalan baru dan sekolah-sekolah dalam komunitas wilayah yang telah diinfiltrasikan atau ditargetkan oleh NPA. Tetapi ketika dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program-program, sebagian besar dana itu sudah lenyap entah kemana " 96)

Walaupun *Consolidation Operation* ini dilaksanakan dengan setengah hati, tanpa terkoordinir secara terpadu, namun di beberapa wilayah operasi ini dapat terlaksana secara baik. Sebagai contohnya adalah usaha yang dilakukan oleh Kolonel (marinir) Rodolfo C. Biazon yang memimpin satu brigade pasukan marinir di wilayah Davao bagian selatan. Dengan dana yang cukup terbatas, Kolonel Biazon berhasil mengefektifkan dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan program tersebut. Pasukan-pasukan

96) Sandra Burton, Impossible Dream : The Marcoses, The Aquinos, and The Unfinished Revolution, Warner Books Inc., New York, 1989, hal. 227

marinir di wilayah ini yang dipimpin oleh Kolonel Biazon secara intensif melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana masyarakat, seperti : memperbaiki sekolah-sekolah, saluran-saluran pengairan, dan lain-lain. Mereka juga membantu para petani mengolah sawahnya dan turut memberi pelajaran di sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Orang-orang sipil yang ditawan karena dituduh sebagai anggota NPA diperlakukan amat manusiawi. Hasilnya memang luar biasa. Dalam waktu tiga bulan setelah dilaksanakan operasi tersebut, kegiatan gerilyawan NPA dibagian selatan Davao menurun secara dratis, padahal di sektor-sektor lain di sekitar Davao gerilyawan NPA masih merajalela. 97) Mengomentari keberhasilan operasinya di wilayah Davao bagian selatan, Kolonel Biazon pernah memberi penjelasan sebagai berikut. " Pembantaian atau pembunuhan bukanlah suatu alternatif untuk menghancurkan NPA. Untuk menghancurkan mereka seharusnya kita melakukan perang urat syaraf. Setiap kali saya melihat seorang anggota NPA dibunuh, saya melihat pada diri saya sendiri, apabila hal tersebut terjadi pada saudara saya. Banyak warga masyarakat yang bergabung dengan NPA hanya karena menginginkan suatu perubahan fundamental dalam kehidupan sosial mereka. 98)

97) Nadeak, hal. 221-222

98) Burton, hal. 225



Tahap keempat dari Operasi Stabilitas adalah *Development Operation* (Operasi Pembangunan). Operasi ini merupakan program jangka panjang yang dipersiapkan untuk penarikan kembali unit-unit militer reguler dari wilayah-wilayah yang secara politis dan militer telah dikuasai pemerintah. Setelah penarikan unit-unit militer dari wilayah-wilayah tersebut, maka mulailah dilakukan usaha-usaha pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Operasi ini pada masa pemerintahan Marcos belum terlaksana sama sekali, karena pada era tahun 1980-an kekuatan militer NPA malah semakin menguat dan mengontrol sebagian besar wilayah-wilayah pedesaan di Filipina. Selain itu Presiden Marcos keburu "terjungkal" oleh *Revolusi People's Power* yang dilancarkan oleh rakyat pada bulan Februari 1986.

BAB VI

PENUTUP

Pada akhir masa jabatan Presiden Marcos yang pertama (1965-1969), Filipina diguncang kembali oleh usaha pemberontakan bersenjata golongan komunis. Bangkitnya perlawanan golongan komunis ini diawali dengan dibentuknya sebuah partai komunis baru, Partai Komunis Filipina (*Communist Party of Philippines*), pada akhir tahun 1968 di Propinsi Pengasinan, Luzon Utara. Lahirnya partai komunis baru di Filipina tersebut, diprakarsai oleh Jose Maria Sison dan sejumlah generasi muda Marxis yang berpikiran modern dan progresif.

Maksud didirikannya partai komunis baru tersebut, sebenarnya untuk melanjutkan perjuangan partai komunis sebelumnya, PKP (*Partindo Komunista ng Philipinas*), untuk mendirikan sebuah negara komunis di Filipina. PKP pada dasarnya pernah mempunyai peranan cukup besar dalam perjuangan politik golongan sayap kiri Filipina pada era tahun 1930-an sampai awal tahun 1950-an.

Dalam perspektif global, berdirinya CPP pada akhir tahun 1960-an, dilatarbelakangi oleh situasi yang berkembang pada waktu itu di Filipina, terutama situasi sosial, ekonomi dan politik. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya CPP. *Faktor pertama* adalah, kondisi sosial, ekonomi dan politik Filipina, semenjak kemerdekaannya sampai dekade tahun 1960-an yang tidak menunjuk-

kan kemajuan yang cukup berarti, bahkan mendorong semakin terabaikannya kepentingan rakyat kecil. *Faktor kedua*, adalah, pengaruh Amerika Serikat yang cukup besar dalam kebijaksanaan pemerintah Filipina, serta keberadaan dua pangkalan Amerika Serikat di Filipina. Sebagai ilustrasi dari kondisi tersebut, dapat kita lihat pada situasi Filipina di era tahun 1960-an. Pada waktu itu Amerika Serikat berusaha melibatkan Filipina secara langsung dalam perang Amerika Serikat di Vietnam, melalui usaha-usaha yang bersifat "memaksa". *Faktor ketiga* adalah, kegagalan perjuangan PKP dan munculnya generasi muda Marxis yang berpikiran modern dan progresif. Kegagalan perjuangan PKP untuk mendirikan sebuah negara komunis di Filipina, secara tidak langsung telah memberikan pelajaran berharga bagi generasi muda penganut Marxis pada era tahun 1960-an. Dengan belajar dari kesalahan-kesalahan PKP pada masa lalu, generasi muda Marxis yang pada tahun 1960-an yang mulai didominasi oleh kalangan menengah terpelajar, mulai memikirkan suatu pola perjuangan baru yang lebih berkonsepsi dan lebih efektif. Usaha pertama yang kemudian mereka lakukan adalah mendirikan sebuah partai komunis yang mempunyai corak dan strategi perjuangan yang cukup berbeda dengan PKP. Partai tersebut adalah CPP, yang didirikan pada akhir tahun 1968.

Sejak dibentuknya pada tahun 1968 dalam Konferensi Pengasinan, CPP telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sampai pertengahan tahun 1980-an. Pertumbuhan

kekuatan dan pengaruh CPP yang terus meningkat tersebut, telah menguatkan asumsi bahwa partai tersebut mempunyai struktur organisasi yang cukup kuat, efektif dan efisien. Struktur organisasi CPP bersifat desentralistis, yang memberikan keleluasaan cukup besar kepada para pimpinan cabang partai untuk menafsirkan kebijaksanaan Komite Sentral, untuk disesuaikan dengan kondisi medan yang mereka hadapi. Walaupun struktur organisasi CPP bersifat desentralistis, tetapi Komite Sentral tetap menerapkan sistem pengawasan dan kontrol yang cukup ketat terhadap cabang-cabang partai maupun organ-organ partai sampai ke tingkat lokal. Selain itu, karena luwesnya batasan ideologi yang diterapkan oleh CPP, maka tidaklah mengherankan banyak kalangan menengah terpelajar maupun sejumlah rohaniawan masuk menjadi anggota partai tersebut. Dari golongan inilah CPP memperoleh tenaga-tenaga inti atau *hard core*, yang nantinya akan mendominasi kepemimpinan partai secara keseluruhan.

Dalam usaha pemberontakannya, CPP secara garis besar menitikberatkan strategi perjuangannya dalam bidang militer dan politik. Secara konseptual, penerapan strategi perjuangan CPP didasarkan pada doktrin Mao Zedong mengenai "perang rakyat". Dalam bidang militer, strategi perang gerilya merupakan prinsip fundamental yang diangkat oleh CPP dalam perjuangannya. Melalui strategi perang gerilya yang dilakukan dalam fase panjang, kekuatan tentara komunis akan disebarakan ke berbagai front

melalui pulau-pulau untuk mendesak dan menekan kekuatan pemerintah. Sedangkan dalam bidang politik, CPP mengambil strategi pembentukan sebuah front nasional yang mengarah pada pembentukan sebuah aliansi/koalisi dari berbagai organisasi massa maupun partai yang mempunyai tujuan perjuangan searah dengan golongan sayap kiri. Perjuangan legal maupun ilegal dari front nasional melalui protes massa, pemboikotan, pemogokan dan taktik-taktik sejenisnya, diharapkan akan mendukung perjuangan bersenjata CPP. Untuk menangani perjuangan partai dalam bidang militer dan politik, CPP membentuk dua badan penting, yaitu NPA (*New People Army*) dan NDF (*National Democratic Front*). NPA menangani perjuangan dalam bidang militer atau berfungsi sebagai sayap militer CPP. Sedangkan NDF menangani perjuangan dalam bidang politik atau berfungsi sebagai sayap politik CPP.

Untuk memadamkan pemberontakan CPP, regim Marcos cenderung mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan bersifat militer. Melalui operasi-operasi militer konvensional yang dilakukan secara intensif dengan dukungan dana dan persenjataan dari Amerika Serikat, Marcos berkeyakinan pemberontakan golongan komunis akan berhasil dipadamkan. Untuk memadamkan pemberontakan CPP, maka usaha pertama yang ditempuh Marcos adalah melakukan operasi-operasi militer secara terpadu. Operasi-operasi militer konvensional yang dilakukan Marcos ini lebih dikenal dengan sebutan Operasi Anti Pemberontakan (*Coun-*

ter Insurgency Operation). Tetapi karena rendahnya kualitas dan tingkat profesional kesatuan-kesatuan militer yang terlibat dalam operasi ini, maka *Counter Insurgency Operation* kurang mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.

Ketika menyadari pemberontakan bersenjata CPP tidak berhasil ditekan apalagi dipadamkan melalui operasi-operasi militer konvensional, maka pada tahun 1983 Marcos melakukan Operasi Stabilitas atau *Oplan Katatagan*. Operasi ini berusaha menggabungkan usaha-usaha militer dengan usaha-usaha bersifat kemanusiaan, untuk memadamkan pemberontakan CPP. Tetapi secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Marcos untuk memadamkan pemberontakan komunis kurang berhasil, karena pemerintah Marcos cenderung memproyeksikan penghancuran kekuatan fisik CPP, bukannya menanggulangi akar-akar utama penyebab timbulnya pemberontakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adisusilo, Sutarjo.
1994 *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad VIII-XIX.*
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Arcilla, Jose S.
1973 *An Introduction to Philippine History.*
Anteneo De Manila University Press, Manila.
- Bey, Arifin.
1953 *Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung.* Penerbit
Tinta Mas, Jakarta.
- Bonner, Raymond.
1992 *Keserakahan Sang Diktaktor, Keluarga Marcos
dan Perwujudan Kebijakan Amerika Serikat.*
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bresnan, John (ed)
1986 *Krisis Filipina, Zaman Marcos dan Keruntu-
hannya.* Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam.
1982 *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Penerbit Gramedia,
Jakarta.
- Burton, Sandra.
1989 *Impossible Dream ; The Marcoses, The Aquinos,
and The Unfinished Revolution.* Warner Books
Inc., New York.
- Chapman, William.
1990 *Inside The Philippine Revolution.* W.W. Norton
& Company, New York.
- Davis, Leonard.
1987 *The Philippines: People, Poverty and Politics.*
St. Martin's Press, New York.
- 1989 *Revolutionary Struggle in the Philippines.*
St. Martin's Press, New York.
- Gottschalk, Louis.
1975 *Mengerti Sejarah,* Penerbit Universitas
Indonesia, Jakarta.
- Hart, Michael.
1985 *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam
Sejarah.* Pustaka Jaya, Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jones, Gregg R.
1989 *Red Revolution: Inside The Philippines Guer-
rilla Movement*. Westview Press, San Fransisco.
- Juan, E. San.
1986 *Crisis In The Philippines : The Making of a
Revolution*. Bergin and Carvey Publishers
Inc., Massachusetts.
- Kartodirdjo, Sartono
1982 *Pemikiran dan Perkembangan Historigrafi Indo-
nesia, Suatu Alternatif*, Penerbit Gramedia,
Jakarta.
- Kartono, Kartini.
1980 *Pengantar Metodologi Research Social*. Pe-
nerbit Alumni, Bandung.
- Kessler, Richard J.
1989 *Rebellion and Repression in the Philippines*.
Yale University Press, Amerika Serikat.
- Lachica, Eduardo.
1971 *The Huks : Philippines Agrarian Society In
Revolt* Praeger, New York.
- Moain, Amat Johari.
1969 *Sejarah Nasionalisme Maphilindo (Malaysia,
Philippina, Indonesia)*, Serikat Percetakan
Utusan Melayu Berhad, Kuala Lumpur.
- Nadeak, Kustigar dan Atmadji.
1986 *Revolus Damai, Rekamanan Kemelut di Filipina*,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pane, Armin.
1951 *Tiongkok Zaman Baru*. Penerbit Arbati,
Jakarta.
- Simon, Lewis M.
1987 *Worth Dying For*. William Morrow and Company
Inc., New York.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed).
1987 *Metode Penelitian Survai*. LP3ES, Jakarta.
- Surachman, Winarno.
1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode
dan Tehnik*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Widyasusanta, L.
1991 *Sejarah Filipina*. IKIP Sanata Dharma, Yogya-
karta.

B. ARTIKEL SURAT KABAR DAN MAJALAH

Priyono, Herry.
1989 "1989, Tahun Persimpangan Masa Depan Filipina. *Kompas*, 22 Februari.

Surendro, Djati.
1987 "RAM : Gerakan Perwira Penasaran". *Jakarta-Jakarta*, no. 61, 4 - 10 September.





LAMPIRAN I

Perkiraan Perkembangan Kekuatan dan Pengaruh NPA, 1972-1988

A. Perkiraan Pemerintah Filipina dan Amerika

Tanggal Perkiraan	Kekuatan tentara	Persentase Barangay yang Berada dalam Pengaruh NPA
September 1972	1,000-2,000	
Awal 1976	1,800	
Awal 1979	2,000-3,000	
Oktober 1980	3,500	
Agustus 1981	3,600	
Oktober 1982	6,000	2-3%
Juni 1983	7,500	
Februari 1984	10,000	
September 1984	8,000 ^a	
Maret 1985	10,000-12,000	4%
Agustus 1985	20,000	28%
Oktober 1985	16,500	20%
November 1985	16,500	20%
Februari 1986	20,000	4-5% ^a
Maret 1986	20,000	
Mei 1986	22,000	
Juni 1986	22,000	20%
Maret 1988	24,000-26,000 ^a	20%

B. Perkiraan NPA

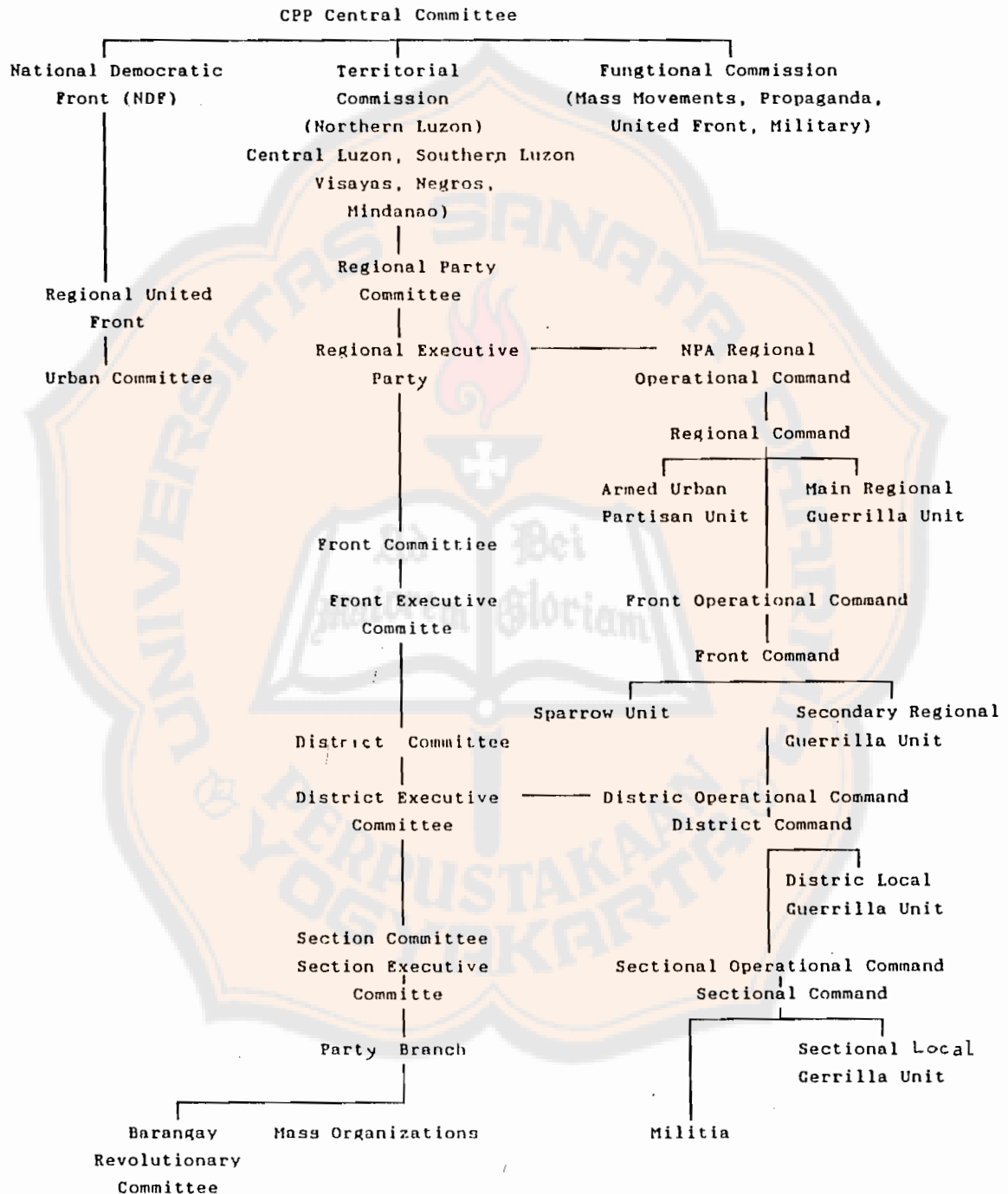
Tahun	Kekuatan	Jumlah Front	Jumlah Propinsi/Barangay
1968-69	35	-2	2 propinsi
1972	350	10	9 propinsi
1976	1,500	21	31 propinsi
1977	1,500		40 propinsi
1980	8,000	25	43 propinsi
1981		30	
1982	10,000	36	60 propinsi
1983-85	30,000	45-53	10,000 propinsi
1987	7,600 (dengan senapan)	70	

a. Perkiraan Pemerintah Filipina

Sumber : Richard J. Kessler dalam *Rebellion and Repression in the Philippines*, Yale University Press, London, 1989, hal. 56.

LAMPIRAN II

Tabel Struktur Organisasi CPP/NPA



Sumber : Richard J. Kessler dalam *Rebellion and Repression in the Philippines*, Yale University Press, London, 1989, hal. 64.

LAMPIRAN III

Perkembangan Angkatan Bersenjata Filipina, 1965-1986

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
AD	25,000	25,500	17,000	15,500	18,000	18,000
AL	4,000	5,000	5,000	5,500	5,500	6,000
AU	7,000	7,000	8,000	9,000	9,000	9,000
PC ^a	15,500	15,500	17,000	17,000	17,000	17,000
Total	51,000	53,000	49,000	57,000	49,500	55,000
	1971	1972	1973	1974	1975	1976
AD	17,600	16,000	19,300	35,000	39,000	45,000
AL	8,000	6,000	12,200	11,000	14,000	17,000
Marinir ^b					(5,500)	(7,000)
AU	9,000	9,000	11,200	9,000	14,000	16,000
PC	23,500	23,000	27,180	34,900	34,900	35,000
L.H.D. ^c					(25,500)	(25,000)
Total	58,100	54,100	69,880	89,900	101,900	113,000
	1977	1978	1979	1980	1981	1982
AD	63,000	63,000	65,000	70,000	70,000	70,000
AL	20,000	20,000	22,000	26,000	26,000	26,000
Marinir	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(6,800)	(6,800)
Penjaga Pantai					2,000	2,000
AU	16,000	16,000	16,000	16,800	16,800	16,800
PC	40,000	40,000	47,000	43,500	43,500	43,500
L.H.D	(25,000)	(25,000)	(35,000)	(35,000)	(65,000)	(65,000)
Total	139,000	139,000	150,000	156,300	158,300	158,300
	1983	1984	1985	1986		
AD	60,000	60,000	70,000	70,000		
AL	28,000	28,000	28,000	26,000		
Marinir	(9,600)	(6,800)	(9,600)	(9,500)		
Penjaga Pantai	2,000	2,000	2,000	2,000		
AU	16,800	16,800	16,800	17,000		
PC	43,500	43,500	40,000	50,000		
L.H.D	(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)		
Total	150,500	150,300	156,800	165,000		

a. PC : Philippine Constabulary

b. Kesatuan Marinir sudah termasuk dalam AL, sehingga tidak dihitung dalam jumlah total

c. L.H.D. Local Home Defense Forces, tidak dihitung dalam jumlah total karena kesatuan ini bukan merupakan bagian dari angkatan perang reguler Filipina.

Sumber : Richard J. Kessler, dalam *Rebellion and Repression in the Philippines*, Yale University Press, London, 1989, hal. 108-109

LAMPIRAN IV

Peta Wilayah Filipina

